MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44/PMK.03/2020
TENTANG
INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dimaksud;

b. bahwa memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian saat ini, khususnya dengan makin meluasnya dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) ini ke sektor-sektor lainnya, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, perlu memberikan perluasan insentif pajak bagi setiap wajib pajak baik untuk pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai;

c. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk wajib pajak Terdampak Wabah Virus Corona sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 19 (COVID-19) sehingga

perlu dilakukan perluasan untuk menjangkau sektor yang akan diberikan insentif;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17C ayat (7) dan Pasal 17D ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Pasal 9 ayat (4d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6214);
9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.
4. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada Pemberi Kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan Pemberi Kerja.
5. Pemberi Kerja adalah orang pribadi atau badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan, atau unit, termasuk Instansi Pemerintah, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan/atau pembayaran lain dengan nama atau dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh Pegawai.
6. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor yang selanjutnya disebut KITE adalah Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian, dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
7. Perusahaan KITE adalah badan usaha yang telah memenuhi ketentuan dan ditetapkan melalui keputusan Menteri Keuangan untuk mendapatkan fasilitas KITE sesuai perundang-undangan di bidang kepabeanan.
8. Kawasan Berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah

atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

9. Penyelenggara Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat.
10. Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat yang selanjutnya disebut Pengusaha Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan penyelenggaraan sekaligus pengusahaan Kawasan Berikat.
11. Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat yang selanjutnya disebut PDKB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pengusahaan kawasan berikat yang berada di dalam Kawasan Berikat milik Penyelenggara Kawasan Berikat yang berstatus sebagai badan hukum yang berbeda.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
13. Surat Pemberitahuan Tahunan, yang selanjutnya disebut SPT Tahunan, adalah surat pemberitahuan yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Kantor Pelayanan Pajak, yang selanjutnya disebut KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
16. Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah

desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

17. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
19. Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh.
20. Surat Keterangan PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Surat Keterangan, adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menerangkan bahwa Wajib Pajak dikenai PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
21. Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
22. Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB II
INSENTIF PPh PASAL 21

Pasal 2

(1) Penghasilan yang diterima Pegawai wajib dipotong sesuai ketentuan PPh Pasal 21 oleh Pemberi Kerja.

(2) PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung Pemerintah atas penghasilan yang diterima Pegawai dengan kriteria tertentu.

(3) Pegawai dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja yang:
      1. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
      2. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
      3. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;
   b. memiliki NPWP; dan
   c. pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 adalah sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum dalam:
   a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 yang telah dilaporkan Pemberi Kerja; atau
   b. data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (*masterfile*) Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018 atau bagi Instansi Pemerintah.

(5) PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung

PPh Pasal 21 kepada Pegawai.

(6) Dikecualikan dari PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal penghasilan yang diterima Pegawai berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan PPh Pasal 21 telah ditanggung Pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(7) PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah yang diterima oleh Pegawai dari Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.

(8) Dalam hal Pegawai yang menerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah menyampaikan SPT Tahunan orang pribadi Tahun Pajak 2020 dan menyatakan kelebihan pembayaran, kelebihan pembayaran yang berasal dari PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah tidak dapat dikembalikan.

(9) PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.

(10) Contoh penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Pemberi Kerja menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat Pemberi Kerja terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Pemberi Kerja menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(3) Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), mulai dimanfaatkan sejak Masa Pajak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020.

(4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam:

a. Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 2 harus dilampiri dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE; atau

b. Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 3 harus dilampiri dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.

(5) Dalam hal Pemberi Kerja yang telah menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, Kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Pemberi Kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Pemberi Kerja harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode *billing* yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2020" atas PPh Pasal 21 ditanggung

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(3) Laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pemberi Kerja paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

BAB III
INSENTIF PPh FINAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

Pasal 5

(1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

(2) PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi dengan cara:
   a. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
   b. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.

(3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan fotokopi Surat Keterangan pada saat:
   a. melakukan transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan atau pemungutan PPh dengan Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemotong atau Pemungut Pajak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
   b. melakukan impor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 Impor.

(4) Pemotong atau Pemungut Pajak sebelum melakukan pemotongan atau pemungutan harus melakukan konfirmasi atas kebenaran Surat Keterangan yang diserahkan oleh Wajib Pajak.

(5) Dalam hal hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan:
   a. terkonfirmasi, Pemotong atau Pemungut Pajak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; atau
   b. tidak terkonfirmasi, Pemotong atau Pemungut Pajak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh sesuai ketentuan umum PPh.

(6) PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung Pemerintah.

(7) PPh final ditanggung Pemerintah yang diterima oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.

(8) Dalam hal Surat Keterangan telah terkonfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, untuk menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pemotong atau Pemungut Pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

(9) PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.

(10) Contoh penghitungan PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).

(2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh Wajib Pajak termasuk yang telah memiliki Surat Keterangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id.

(3) Tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

(4) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berlaku dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

(5) Bentuk dokumen berupa Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak termasuk dari transaksi dengan Pemotong atau Pemungut.

(3) Insentif PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan oleh Wajib Pajak sepanjang Wajib Pajak tersebut telah memiliki Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebelum laporan disampaikan.

(4) Pemotong atau Pemungut Pajak harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode *billing* yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2020" atas transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a.

(5) Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Wajib Pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Pasal 8

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah.

BAB IV

INSENTIF PPh PASAL 22 IMPOR

Pasal 9

(1) PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang.

(2) Besarnya tarif PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

mengenai pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

(3) PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari pemungutan kepada Wajib Pajak yang:
   a. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
   b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
   c. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB, pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.

(4) Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum pada:
   a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 yang telah dilaporkan Wajib Pajak; atau
   b. data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (*masterfile*) Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018.

(5) Pembebasan dari pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.

(6) Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesuai contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(7) Permohonan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada:
   a. ayat (3) huruf b dilampiri dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE; atau

b. ayat (3) huruf c dilampiri dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.

(8) Kepala KPP menerbitkan:

a. Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor, apabila Wajib Pajak memenuhi; atau

b. Surat Penolakan, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi;

kriteria Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Perusahaan KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, atau Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf K dan huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(9) Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020.

(10) Wajib Pajak yang telah mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap 3 (tiga) bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(11) Laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan paling lambat:

a. tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020; dan

b. tanggal 20 Oktober 2020, untuk Masa Pajak Juli 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.

BAB V

INSENTIF ANGSURAN PPh PASAL 25

Pasal 10

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan yang masih harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

a. Pasal 25 Undang-Undang PPh; dan/atau
b. Peraturan Menteri Keuangan mengenai penghitungan angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak baru, bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala dan Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

Pasal 11

(1) Wajib Pajak yang:
    a. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
    b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
    c. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;

    diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2) Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum pada:
    a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 yang telah dilaporkan Wajib Pajak; atau

b. data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (*masterfile*) Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018.

(3) Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020.

(5) Contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c, Kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Wajib Pajak yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap 3 (tiga) bulan melalui saluran tertentu pada laman

www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Laporan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat:

a. tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020; dan

b. tanggal 20 Oktober 2020, untuk Masa Pajak Juli 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.

BAB VI
INSENTIF PPN

Pasal 14

(1) Wajib Pajak yang:

a. memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE, atau

c. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;

dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) UndangUndang PPN.

(2) Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum pada:

a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 atau pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018, yang telah dilaporkan Wajib

Pajak; atau

b. data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (*masterfile*) Wajib Pajak pusat bagi Wajib Pajak belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018.

(3) Ketentuan mengenai Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi Wajib Pajak pusat maupun cabang.

(4) Pengusaha Kena Pajak yang telah mendapatkan fasilitas KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melampirkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE, dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan.

(5) Pengusaha Kena Pajak yang telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus melampirkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB, dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan.

(6) Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Pemberitahuan Masa PPN termasuk pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN, untuk Masa Pajak sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan Masa Pajak September 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Oktober 2020.

(7) PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pengembalian pendahuluan berdasarkan kriteria tertentu.

(8) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:

a. PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah;

b. Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah; dan

c. PKP memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, fasilitas KITE atau izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB yang diberikan kepada PKP masih berlaku pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan lebih bayar restitusi.

(9) Tata cara atas pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penelitian terhadap pemenuhan kegiatan tertentu, dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Pemberi Kerja atau Wajib Pajak yang sudah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan/atau pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona tidak perlu menyampaikan kembali pemberitahuan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
2. Wajib Pajak yang sudah menyampaikan permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor dan/atau telah diterbitkan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona tidak perlu menyampaikan kembali permohonan Surat Keterangan

Bebas PPh Pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri ini.

3. Pemberi Kerja atau Wajib Pajak yang telah disetujui untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25, dan/atau pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona tetap dapat memanfaatkan insentif-insentif tersebut.
4. Penyampaian laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, dan/atau pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 bagi Pemberi Kerja atau Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 277), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 411

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

TITIN KRISNIATI
NIP 19730115 199803 2 002

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44/PMK.03/2020
TENTANG
INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

A. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU) WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
1	10110	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS
2	10120	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS
3	10130	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS
4	10211	INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN IKAN
5	10212	INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN IKAN
6	10213	INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN
7	10214	INDUSTRI PEMINDANGAN IKAN
8	10215	INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI IKAN
9	10216	INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI
10	10217	INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN IKAN
11	10219	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN
12	10221	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR (BUKAN UDANG) DALAM KALENG
13	10222	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN UDANG DALAM KALENG
14	10291	INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN BIOTA AIR LAINNYA
15	10292	INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN BIOTA AIR LAINNYA
16	10293	INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA
17	10294	INDUSTRI PEMINDANGAN BIOTA AIR LAINNYA
18	10295	INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI BIOTA AIR LAINNYA
19	10296	INDUSTRI BERBASIS LUMATAN BIOTA AIR LAINNYA
20	10297	INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN BIOTA AIR LAINNYA
21	10299	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK BIOTA AIR LAINNYA
22	10311	INDUSTRI PENGASINAN/PEMANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
23	10312	INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
24	10313	INDUSTRI PENGERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
25	10314	INDUSTRI PEMBEKUAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
26	10320	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG
27	10330	INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN
28	10391	INDUSTRI TEMPE KEDELAI
29	10392	INDUSTRI TAHU KEDELAI
30	10399	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
31	10411	INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK NABATI
32	10412	INDUSTRI MARGARINE
33	10413	INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK HEWANI SELAIN IKAN
34	10414	INDUSTRI MINYAK IKAN
35	10415	INDUSTRI MINYAK GORENG BUKAN MINYAK KELAPA DAN MINYAK KELAPA SAWIT
36	10421	INDUSTRI KOPRA
37	10422	INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPA
38	10423	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA
39	10424	INDUSTRI TEPUNG DAN PELET KELAPA

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
40	10431	INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPAN SAWIT (CRIUDE PALM OIL)
41	10432	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
42	10490	INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI LAINNYA
43	10510	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM
44	10520	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL
45	10531	INDUSTRI PENGOLAHAN ES KRIM
46	10532	INDUSTRI PENGOLAHAN ES SEJENISNYA YANG DAPAT DIMAKAN (BUKAN ES BATU DAN ES BALOK)
47	10590	INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK DARI SUSU LAINNYA
48	10611	INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN PADI-PADIAN DAN BIJI-BIJIAN
49	10612	INDUSTRI PENGUPASAN, PEMBERSIHAN DAN SORTASI KOPI
50	10613	INDUSTRI PENGUPASAN, PEMBERSIHAN DAN PENGERINGAN KAKAO
51	10614	INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN BIJI-BIJIAN BUKAN KOPI DAN KAKAO
52	10615	INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN KACANG-KACANGAN
53	10616	INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN UMBI-UMBIAN (TERMASUK RIZOMA)
54	10617	INDUSTRI TEPUNG TERIGU
55	10618	INDUSTRI BERBAGAI MACAM TEPUNG DARI PADI-PADIAN, BIJI-BIJIAN, KACANG-KACANGAN,
56	10621	INDUSTRI PATI UBI KAYU
57	10622	INDUSTRI BERBAGAI MACAM PATI PALMA
58	10623	INDUSTRI GLUKOSA DAN SEJENISNYA
59	10629	INDUSTRI PATI LAINNYA
60	10631	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS
61	10632	INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG
62	10633	INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN TEPUNG JAGUNG
63	10634	INDUSTRI PATI BERAS DAN JAGUNG
64	10710	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE
65	10721	INDUSTRI GULA PASIR
66	10722	INDUSTRI GULA MERAH
67	10723	INDUSTRI SIROP
68	10729	INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA BUKAN SIROP
69	10731	INDUSTRI KAKAO
70	10732	INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA
71	10733	INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING
72	10739	INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA
73	10740	INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA
74	10750	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN
75	10761	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI DAN TEH
76	10762	INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (HERB INFUSION)
77	10771	INDUSTRI KECAP
78	10772	INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN
79	10773	INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA
80	10774	INDUSTRI PENGOLAHAN GARAM
81	10779	INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA
82	10791	INDUSTRI MAKANAN BAYI
83	10792	INDUSTRI KUE BASAH
84	10793	INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU
85	10794	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA
86	10799	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA
87	10801	INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN
88	10802	INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN
89	11010	INDUSTRI MINUMAN KERAS
90	11020	INDUSTRI MINUMAN ANGGUR (WINE)
91	11030	INDUSTRI MINUMAN KERAS DARI MALT DAN MALT
92	11040	INDUSTRI MINUMAN RINGAN

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
93	11050	INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL
94	11090	INDUSTRI MINUMAN LAINNYA
95	12011	INDUSTRI ROKOK KRETEK
96	12012	INDUSTRI ROKOK PUTIH
97	12019	INDUSTRI ROKOK DAN CERUTU LAINNYA
98	12091	INDUSTRI PENGERINGAN DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU
99	12099	INDUSTRI BUMBU ROKOK SERTA KELENGKAPAN ROKOK LAINNYA
100	13111	INDUSTRI PERSIAPAN SERAT TEKSTIL
101	13112	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG
102	13113	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG JAHIT
103	13121	INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA)
104	13122	INDUSTRI KAIN TENUN IKAT
105	13123	INDUSTRI BULU TIRUAN TENUNAN
106	13131	INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG
107	13132	INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN
108	13133	INDUSTRI PENCETAKAN KAIN
109	13134	INDUSTRI BATIK
110	13911	INDUSTRI KAIN RAJUTAN
111	13912	INDUSTRI KAIN SULAMAN/BORDIR
112	13913	INDUSTRI BULU TIRUAN RAJUTAN
113	13921	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
114	13922	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN
115	13923	INDUSTRI BANTAL DAN SEJENISNYA
116	13924	INDUSTRI BARANG JADI RAJUTAN DAN SULAMAN
117	13929	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA
118	13930	INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI
119	13941	INDUSTRI TALI
120	13942	INDUSTRI BARANG DARI TALI
121	13991	INDUSTRI KAIN PITA (NARROW FABRIC)
122	13992	INDUSTRI YANG MENGHASILKAN KAIN KEPERLUAN INDUSTRI
123	13993	INDUSTRI NON WOVEN (BUKAN TENUNAN)
124	13994	INDUSTRI KAIN BAN
125	13995	INDUSTRI KARUNG GONI
126	13996	INDUSTRI KARUNG BUKAN GONI
127	13997	INDUSTRI KAPUK
128	13999	INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL
129	14111	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL
130	14112	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI KULIT
131	14120	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN
132	14131	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL
133	14132	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI KULIT
134	14200	INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU
135	14301	INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN
136	14302	INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BORDIR
137	14303	INDUSTRI RAJUTAN KAOS KAKI DAN SEJENISNYA
138	15111	INDUSTRI PENGAWETAN KULIT
139	15112	INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT
140	15113	INDUSTRI PENCELUPAN KULIT BULU
141	15114	INDUSTRI KULIT BUATAN/IMITASI
142	15121	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI
143	15122	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN TEKNIK/INDUSTRI
144	15123	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN HEWAN
145	15129	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN LAINNYA

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
146	15201	INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI
147	15202	INDUSTRI SEPATU OLAHRAGA
148	15203	INDUSTRI SEPATU TEKNIK LAPANGAN/KEPERLUAN INDUSTRI
149	15209	INDUSTRI ALAS KAKI LAINNYA
150	16101	INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU
151	16102	INDUSTRI PENGAWETAN KAYU
152	16103	INDUSTRI PENGAWETAN ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA
153	16104	INDUSTRI PENGOLAHAN ROTAN
154	16211	INDUSTRI KAYU LAPIS
155	16212	INDUSTRI KAYU LAPIS LAMINASI, TERMASUK DECORATIVE PLYWOOD
156	16213	INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA
157	16214	INDUSTRI VENEER
158	16221	INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU
159	16222	INDUSTRI BANGUNAN PRAFABRIKASI DARI KAYU
160	16230	INDUSTRI WADAH DARI KAYU
161	16291	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU
162	16292	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN BUKAN ROTAN DAN BAMBU
163	16293	INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER
164	16294	INDUSTRI ALAT DAPUR DARI KAYU, ROTAN DAN BAMBU
165	16295	INDUSTRI KAYU BAKAR DAN PELET KAYU
166	16299	INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL
167	17011	INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP)
168	17012	INDUSTRI KERTAS BUDAYA
169	17013	INDUSTRI KERTAS BERHARGA
170	17014	INDUSTRI KERTAS KHUSUS
171	17019	INDUSTRI KERTAS LAINNYA
172	17021	INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG
173	17022	INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON
174	17091	INDUSTRI KERTAS TISSUE
175	17099	INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA YTDL
176	18111	INDUSTRI PENCETAKAN UMUM
177	18112	INDUSTRI PENCETAKAN KHUSUS
178	18120	JASA PENUNJANG PENCETAKAN
179	18201	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN SUARA DAN PIRANTI LUNAK
180	18202	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO
181	19100	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA
182	19211	INDUSTRI PEMURNIAN DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI
183	19212	INDUSTRI PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN GAS ALAM
184	19213	INDUSTRI PEMBUATAN MINYAK PELUMAS
185	19214	INDUSTRI PENGOLAHAN KEMBALI MINYAK PELUMAS BEKAS
186	19291	INDUSTRI PRODUK DARI HASIL KILANG MINYAK BUMI
187	19292	INDUSTRI BRIKET BATU BARA
188	20111	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI
189	20112	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI
190	20113	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMEN
191	20114	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA
192	20115	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN
193	20116	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT WARNA DAN PIGMEN, ZAT WARNA DAN PIGMEN
194	20117	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI MINYAK BUMI, GAS ALAM DAN BATU BARA
195	20118	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS
196	20119	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA
197	20121	INDUSTRI PUPUK ALAM/NON SINTETIS HARA MAKRO PRIMER
198	20122	INDUSTRI PUPUK BUATAN TUNGGAL HARA MAKRO PRIMER
199	20123	INDUSTRI PUPUK BUATAN MAJEMUK HARA MAKRO PRIMER

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
200	20124	INDUSTRI PUPUK BUATAN CAMPURAN HARA MAKRO PRIMER
201	20125	INDUSTRI PUPUK HARA MAKRO SEKUNDER
202	20126	INDUSTRI PUPUK HARA MIKRO
203	20127	INDUSTRI PUPUK PELENGKAP
204	20129	INDUSTRI PUPUK LAINNYA
205	20131	INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU PLASTIK
206	20132	INDUSTRI KARET BUATAN
207	20211	INDUSTRI BAHAN BAKU PEMBERANTAS HAMA (BAHAN AKTIF)
208	20212	INDUSTRI PEMBERANTAS HAMA (FORMULASI)
209	20213	INDUSTRI ZAT PENGATUR TUMBUH
210	20214	INDUSTRI BAHAN AMELIORAN (PEMBENAH TANAH)
211	20221	INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK
212	20222	INDUSTRI PERNIS (TERMASUK MASTIK)
213	20223	INDUSTRI LAK
214	20231	INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA
215	20232	INDUSTRI BAHAN KOSMETIK DAN KOSMETIK, TERMASUK PASTA GIGI
216	20291	INDUSTRI PEREKAT/LEM
217	20292	INDUSTRI BAHAN PELEDAK
218	20293	INDUSTRI TINTA
219	20294	INDUSTRI MINYAK ATSIRI
220	20295	INDUSTRI KOREK API
221	20299	INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL
222	20301	INDUSTRI SERAT/BENANG/STRIP FILAMEN BUATAN
223	20302	INDUSTRI SERAT STAPEL BUATAN
224	21011	INDUSTRI BAHAN FARMASI
225	21012	INDUSTRI PRODUK FARMASI
226	21021	INDUSTRI SIMPLISIA (BAHAN OBAT TRADISIONAL)
227	21022	INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL
228	22111	INDUSTRI BAN LUAR DAN BAN DALAM
229	22112	INDUSTRI VULKANISIR BAN
230	22121	INDUSTRI PENGASAPAN KARET
231	22122	INDUSTRI REMILLING KARET
232	22123	INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER)
233	22191	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
234	22192	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI
235	22199	INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YTDL
236	22210	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK BANGUNAN
237	22220	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN
238	22230	INDUSTRI PIPA PLASTIK DAN PERLENGKAPANNYA
239	22291	INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN
240	22292	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA (TIDAK TERMASUK FURNITUR)
241	22293	INDUSTRI BARANG DAN PERALATAN TEKNIK/INDUSTRI DARI PLASTIK
242	22299	INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNYA YTDL
243	23111	INDUSTRI KACA LEMBARAN
244	23112	INDUSTRI KACA PENGAMAN
245	23119	INDUSTRI KACA LAINNYA
246	23121	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA DARI KACA
247	23122	INDUSTRI ALAT-ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN DARI KACA
248	23123	INDUSTRI KEMASAN DARI KACA
249	23129	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KACA
250	23911	INDUSTRI BATA, MORTAR DAN SEMEN TAHAN API
251	23919	INDUSTRI BARANG TAHAN API DARI TANAH LIAT/KERAMIK LAINNYA
252	23921	INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH LIAT/KERAMIK
253	23922	INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK
254	23923	INDUSTRI PERALATAN SANITER DARI PORSELEN

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
255	23929	INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK BUKAN BATU BATA DAN GENTENG
256	23931	INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI PORSELEN
257	23932	INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT/KERAMIK
258	23933	INDUSTRI ALAT LABORATORIUM DAN ALAT LISTRIK/TEKNIK DARI PORSELEN
259	23939	INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK DAN PORSELEN LAINNYA BUKAN BAHAN BANGUNAN
260	23941	INDUSTRI SEMEN
261	23942	INDUSTRI KAPUR
262	23943	INDUSTRI GIPS
263	23951	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN
264	23952	INDUSTRI BARANG DARI KAPUR
265	23953	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK KONSTRUKSI
266	23954	INDUSTRI BARANG DARI GIPS UNTUK KONSTRUKSI
267	23955	INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN
268	23956	INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI
269	23957	INDUSTRI MORTAR ATAU BETON SIAP PAKAI
270	23959	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN, KAPUR, GIPS DAN ASBES LAINNYA
271	23961	INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN
272	23962	INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN
273	23963	INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN
274	23969	INDUSTRI BARANG DARI MARMER, GRANIT DAN BATU LAINNYA
275	23990	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL
276	24101	INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEEL MAKING)
277	24102	INDUSTRI PENGGILINGAN BAJA (STEEL ROLLING)
278	24103	INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI
279	24201	INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR MULIA
280	24202	INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI
281	24203	INDUSTRI PENGGILINGAN LOGAM BUKAN BESI
282	24204	INDUSTRI EKSTRUSI LOGAM BUKAN BESI
283	24205	INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA
284	24206	INDUSTRI PENGOLAHAN URANIUM DAN BIJIH URANIUM
285	24310	INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA
286	24320	INDUSTRI PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA
287	25111	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN
288	25112	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN
289	25113	INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BAJA UNTUK BANGUNAN
290	25119	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA
291	25120	INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR DAN WADAH DARI LOGAM
292	25130	INDUSTRI GENERATOR UAP, BUKAN KETEL PEMANAS
293	25200	INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI
294	25910	INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK
295	25920	JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI PENGERJAAN KHUSUS LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM
296	25931	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN UNTUK PERTANIAN
297	25932	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN PERTUKANGAN
298	25933	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN YANG DIGUNAKAN DALAM RUMAH TANGGA
299	25934	INDUSTRI PERALATAN UMUM
300	25940	INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM
301	25951	INDUSTRI BARANG DARI KAWAT
302	25952	INDUSTRI PAKU, MUR DAN BAUT
303	25991	INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
304	25992	INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA DARI LOGAM
305	25993	INDUSTRI KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM BUKAN PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA
306	25994	INDUSTRI PEMBUATAN PROFIL
307	25995	INDUSTRI LAMPU DARI LOGAM
308	25999	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL
309	26110	INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK
310	26120	INDUSTRI SEMI KONDUKTOR DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA
311	26210	INDUSTRI KOMPUTER DAN/ATAU PERAKITAN KOMPUTER
312	26220	INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER
313	26310	INDUSTRI PERALATAN TELEPON DAN FAKSIMILI
314	26320	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL (WIRELESS)
315	26390	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA
316	26410	INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI
317	26420	INDUSTRI PERALATAN PEREKAM, PENERIMA DAN PENGGANDA AUDIO DAN VIDEO, BUKAN INDUSTRI TELEVISI
318	26490	INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA
319	26511	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI MANUAL
320	26512	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRIK
321	26513	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK
322	26514	INDUSTRI ALAT UJI DALAM PROSES INDUSTRI
323	26520	INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU
324	26601	INDUSTRI PERALATAN IRADIASI/SINAR X, PERLENGKAPAN DAN SEJENISNYA
325	26602	INDUSTRI PERALATAN ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTERAPI
326	26710	INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI
327	26791	INDUSTRI KAMERA CINEMATOGRAFI PROYEKTOR DAN PERLENGKAPANNYA
328	26792	INDUSTRI TEROPONG DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA
329	26800	INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK
330	27111	INDUSTRI MOTOR LISTRIK
331	27112	INDUSTRI MESIN PEMBANGKIT LISTRIK
332	27113	INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (TRANSFORMATOR), PENGUBAH ARUS (RECTIFIER) DAN
333	27120	INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK
334	27201	INDUSTRI BATU BATERAI KERING (BATU BATERAI PRIMER)
335	27202	INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK (BATU BATERAI SEKUNDER)
336	27310	INDUSTRI KABEL SERAT OPTIK
337	27320	INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA
338	27330	INDUSTRI PERLENGKAPAN KABEL
339	27401	INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR, LAMPU PENERANGAN TERPUSAT DAN LAMPU ULTRA VIOLET
340	27402	INDUSTRI LAMPU TABUNG GAS (LAMPU PEMBUANG LISTRIK)
341	27403	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN UNTUK ALAT TRANSPORTASI
342	27409	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LAINNYA
343	27510	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA
344	27520	INDUSTRI PERALATAN ELEKTROTERMAL RUMAH TANGGA
345	27530	INDUSTRI PERALATAN PEMANAS DAN MASAK BUKAN LISTRIK RUMAH TANGGA
346	27900	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA
347	28111	INDUSTRI MESIN UAP, TURBIN DAN KINCIR
348	28112	INDUSTRI MOTOR PEMBAKARAN DALAM
349	28113	INDUSTRI KOMPONEN DAN SUKU CADANG MESIN DAN TURBIN
350	28120	INDUSTRI PERALATAN TENAGA ZAT CAIR DAN GAS
351	28130	INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN KLEP/KATUP
352	28140	INDUSTRI BEARING, RODA GIGI DAN ELEMEN PENGGERAK MESIN
353	28151	INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG TIDAK MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK
354	28152	INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK

10

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
355	28160	INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH
356	28171	INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI MANUAL
357	28172	INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRIK
358	28173	INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRONIK
359	28174	INDUSTRI MESIN FOTOCOPI
360	28179	INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR LAINNYA
361	28180	INDUSTRI PERKAKAS TANGAN YANG DIGERAKKAN TENAGA
362	28191	INDUSTRI MESIN UNTUK PEMBUNGKUS, PEMBOTOLAN DAN PENGALENGAN
363	28192	INDUSTRI MESIN TIMBANGAN
364	28193	INDUSTRI MESIN PENDINGIN
365	28199	INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM LAINNYA YTDL
366	28210	INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN
367	28221	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGERJAAN LOGAM
368	28222	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGERJAAN KAYU
369	28223	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGERJAAN BAHAN BUKAN LOGAM DAN KAYU
370	28224	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGELASAN YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK
371	28230	INDUSTRI MESIN METALURGI
372	28240	INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI
373	28250	INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU
374	28261	INDUSTRI KABINET MESIN JAHIT
375	28262	INDUSTRI MESIN JAHIT SERTA MESIN CUCI DAN MESIN PENGERING UNTUK KEPERLUAN NIAGA
376	28263	INDUSTRI MESIN TEKSTIL
377	28264	INDUSTRI JARUM MESIN JAHIT, RAJUT, BORDIR DAN SEJENISNYA
378	28265	INDUSTRI MESIN PENYIAPAN DAN PEMBUATAN PRODUK KULIT
379	28291	INDUSTRI MESIN PERCETAKAN
380	28292	INDUSTRI MESIN PABRIK KERTAS
381	28299	INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA YTDL
382	29100	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
383	29200	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER
384	29300	INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
385	30111	INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU
386	30112	INDUSTRI BANGUNAN LEPAS PANTAI DAN BANGUNAN TERAPUNG
387	30113	INDUSTRI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN BAGIAN KAPAL
388	30120	INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL PESIAR DAN PERAHU UNTUK OLAHRAGA
389	30200	INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA
390	30300	INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA
391	30400	INDUSTRI KENDARAAN PERANG
392	30911	INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA
393	30912	INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA
394	30921	INDUSTRI SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK
395	30922	INDUSTRI PERLENGKAPAN SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK
396	30990	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL
397	31001	INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU
398	31002	INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU
399	31003	INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK
400	31004	INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM
401	31009	INDUSTRI FURNITUR LAINNYA
402	32111	INDUSTRI PERMATA
403	32112	INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI
404	32113	INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA BUKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
405	32114	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN TEKNIK DAN ATAU LABORATORIUM
406	32115	INDUSTRI PERHIASAN MUTIARA
407	32119	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI LOGAM MULIA
408	32120	INDUSTRI PERHIASAN IMITASI DAN BARANG SEJENIS
409	32201	INDUSTRI ALAT MUSIK TRADISIONAL
410	32202	INDUSTRI ALAT MUSIK BUKAN TRADISIONAL
411	32300	INDUSTRI ALAT OLAHRAGA
412	32401	INDUSTRI ALAT PERMAINAN
413	32402	INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK
414	32501	INDUSTRI FURNITUR UNTUK OPERASI, PERAWATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI
415	32502	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI, PERLENGKAPAN ORTHOPAEDIC DAN PROSTHETIC
416	32503	INDUSTRI KACA MATA
417	32509	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPAN LAINNYA
418	32901	INDUSTRI ALAT TULIS DAN GAMBAR TERMASUK PERLENGKAPANNYA
419	32902	INDUSTRI PITA MESIN TULIS/GAMBAR
420	32903	INDUSTRI KERAJINAN YTDL
421	32904	INDUSTRI PERALATAN UNTUK PELINDUNG KESELAMATAN
422	32905	INDUSTRI DARI SABUT KELAPA
423	32909	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL
424	33111	JASA REPARASI PRODUK LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP
425	33112	JASA REPARASI PRODUK SENJATA DAN AMUNISI
426	33119	JASA REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI LAINNYA
427	33121	JASA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM
428	33122	JASA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS
429	33131	JASA REPARASI ALAT UKUR, ALAT UJI DAN PERALATAN NAVIGASI DAN PENGONTROL
430	33132	JASA REPARASI PERALATAN IRRADIASI, ELEKTROMEDIS DAN ELEKTROTHERAPI
431	33133	JASA REPARASI PERALATAN FOTOGRAFI DAN OPTIK
432	33141	JASA REPARASI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR
433	33142	JASA REPARASI BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK
434	33149	JASA REPARASI PERALATAN LISTRIK LAINNYA
435	33151	JASA REPARASI KAPAL, PERAHU DAN BANGUNAN TERAPUNG
436	33152	JASA REPARASI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA
437	33153	JASA REPARASI PESAWAT TERBANG
438	33159	JASA REPARASI ALAT ANGKUTAN LAINNYA, BUKAN KENDARAAN BERMOTOR
439	33190	JASA REPARASI PERALATAN LAINNYA
440	33200	JASA PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI
441	01111	PERTANIAN TANAMAN JAGUNG
442	01112	PERTANIAN TANAMAN GANDUM
443	01113	PERTANIAN TANAMAN KEDELAI
444	01114	PERTANIAN TANAMAN KACANG TANAH
445	01115	PERTANIAN TANAMAN KACANG HIJAU
446	01120	PERTANIAN PADI
447	01132	PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA BUAH
448	01133	PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA SAYURAN BUAH
449	01134	PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA SAYURAN UMBI
450	01135	PERTANIAN TANAMAN UMBI-UMBIAN PALAWIJA
451	01136	PERTANIAN TANAMAN JAMUR
452	01139	PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA SAYURAN LAINNYA
453	01140	PERKEBUNAN TEBU
454	01150	PERKEBUNAN TEMBAKAU
455	01193	PERTANIAN TANAMAN BUNGA

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
456	01194	PERTANIAN PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA
457	01220	PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS
458	01230	PERTANIAN BUAH JERUK
459	01261	PERKEBUNAN BUAH KELAPA
460	01262	PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT
461	01269	PERKEBUNAN TANAMAN BUAH OLEAGINOUS LAINNYA
462	01270	PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN
463	01281	PERKEBUNAN LADA
464	01282	PERKEBUNAN CENGKEH
465	01284	PERKEBUNAN TANAMAN AROMATIK/PENYEGAR
466	01285	PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG
467	01286	PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NON RIMPANG
468	01289	PERTANIAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, NARKOTIK DAN OBAT LAINNYA
469	01291	PERKEBUNAN KARET DAN TANAMAN PENGHASIL GETAH LAINNYA
470	01301	PERTANIAN TANAMAN HIAS BUKAN TANAMAN BUNGA
471	01302	PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN HOLTIKULTURA LAINNYA BUKAN BUNGA
472	01411	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG
473	01412	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH
474	01413	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU POTONG
475	01461	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING
476	01462	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR
477	01611	JASA PENGOLAHAN LAHAN
478	01612	JASA PEMUPUKAN, PENANAMAN BIBIT/BENIH DAN PENGENDALIAN JASAD PENGGANGGU
479	01613	JASA PEMANENAN
480	01614	JASA PENYEMPROTAN DAN PENYERBUKAN MELALUI UDARA
481	01619	JASA PENUNJANG PERTANIAN LAINNYA
482	01621	JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK
483	01622	JASA PEMACEKAN TERNAK
484	01623	JASA PENETASAN TELUR
485	01629	JASA PENUNJANG PETERNAKAN LAINNYA
486	01630	JASA PASCA PANEN
487	02111	PENGUSAHAAN HUTAN JATI
488	02120	PENGUSAHAAN HUTAN ALAM
489	02301	PEMUNGUTAN GETAH KARET
490	03111	PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI LAUT
491	03112	PENANGKAPAN CRUSTACEA DI LAUT
492	03113	PENANGKAPAN MOLLUSCA DI LAUT
493	03114	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN ALGAE (TUMBUHAN) DI LAUT
494	03115	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN BENIH IKAN LAUT
495	03116	PENANGKAPAN ECHINODERMATA DI LAUT
496	03117	PENANGKAPAN COELENTERATA DI LAUT
497	03118	PENANGKAPAN IKAN HIAS LAUT
498	03119	PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI LAUT
499	03121	PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN UMUM
500	03122	PENANGKAPAN CRUSTACEA DI PERAIRAN UMUM
501	03123	PENANGKAPAN MOLLUSCA DI PERAIRAN UMUM
502	03124	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN ALGAE DI PERAIRAN UMUM
503	03125	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN INDUK/BENIH IKAN DI PERAIRAN UMUM
504	03129	PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI PERAIRAN UMUM
505	03131	JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI LAUT
506	03132	JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI LAUT
507	03133	JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI LAUT
508	03141	JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM
509	03142	JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
510	03143	JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM
511	03211	PEMBESARAN IKAN LAUT
512	03212	PEMBENIHAN IKAN LAUT
513	03213	BUDIDAYA IKAN HIAS LAUT
514	03214	BUDIDAYA KARANG (CORAL)
515	03221	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM
516	03222	BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA JARING APUNG
517	03223	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA
518	03224	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI SAWAH
519	03225	BUDIDAYA IKAN HIAS AIR TAWAR
520	03226	PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR
521	03231	JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT
522	03232	JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT
523	03241	JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN DI AIR TAWAR
524	03242	JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN DI AIR TAWAR
525	03243	JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN DI AIR TAWAR
526	03251	PEMBESARAN IKAN AIR PAYAU
527	03252	PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU
528	03261	JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU
529	03262	JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU
530	03263	JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU
531	05101	PERTAMBANGAN BATU BARA
532	06100	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI
533	06201	PERTAMBANGAN GAS ALAM
534	07101	PERTAMBANGAN PASIR BESI
535	07102	PERTAMBANGAN BIJIH BESI
536	07291	PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH
537	07292	PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH HITAM
538	07293	PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT
539	07294	PERTAMBANGAN BIJIH TEMBAGA
540	07295	PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL
541	07296	PERTAMBANGAN BIJIH MANGAN
542	07299	PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BIJIH BESI
543	07301	PERTAMBANGAN EMAS DAN PERAK
544	07309	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA LAINNYA
545	08999	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL
546	09100	JASA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM
547	09900	JASA PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA
548	35101	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
549	35201	PENGADAAN GAS ALAM DAN BUATAN
550	35202	DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN
551	38302	DAUR ULANG BARANG BUKAN LOGAM
552	41011	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL
553	41012	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN
554	41013	KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI
555	41014	KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN
556	41015	KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN
557	41016	KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN
558	41017	KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN
559	41018	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN
560	41019	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA
561	41020	PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI GEDUNG
562	42111	KONSTRUKSI JALAN RAYA
563	42112	KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG
564	42113	KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
565	42114	KONSTRUKSI JALAN KERETA API DAN JEMBATAN KERETA API
566	42115	KONSTRUKSI TEROWONGAN
567	42120	PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API
568	42211	KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI
569	42212	KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE
570	42213	KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL
571	42214	KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI SARANA BANTU NAVIGASI LAUT DAN RAMBU SUNGAI
572	42215	KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI NAVIGASI UDARA
573	42216	KONSTRUKSI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API
574	42217	KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI
575	42218	PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH
576	42219	KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA
577	42220	PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH
578	42911	KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR
579	42912	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN
580	42913	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN
581	42914	KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN DAN PENAMPUNGAN BARANG MINYAK DAN GAS
582	42915	PENGERUKAN
583	42919	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL
584	42920	PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA
585	43110	PEMBONGKARAN
586	43120	PENYIAPAN LAHAN
587	43211	INSTALASI LISTRIK
588	43212	INSTALASI TELEKOMUNIKASI
589	43213	INSTALASI NAVIGASI LAUT DAN SUNGAI
590	43214	INSTALASI NAVIGASI UDARA
591	43215	INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API
592	43216	INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA
593	43217	INSTALASI ELEKTRONIKA
594	43221	INSTALASI AIR (PIPA)
595	43222	INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL
596	43223	INSTALASI MINYAK DAN GAS
597	43224	INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA
598	43291	INSTALASI MEKANIKAL
599	43299	INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL
600	43301	PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMUNIUM
601	43302	PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON
602	43303	PENGECATAN
603	43304	DEKORASI INTERIOR
604	43305	DEKORASI EKSTERIOR
605	43309	PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA
606	43901	PEMASANGAN PONDASI DAN PILAR
607	43902	PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER)
608	43903	PEMASANGAN ATAP/ROOF COVERING
609	43904	PEMASANGAN KERANGKA BAJA
610	43905	PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR
611	43909	KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL
612	46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
613	46201	PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA
614	46202	PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK
615	46203	PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TUMBUHAN

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
616	46204	PERDAGANGAN BESAR TEMBAKAU RAJANGAN
617	46206	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN
618	46209	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA
619	46311	PERDAGANGAN BESAR BERAS
620	46312	PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN
621	46313	PERDAGANGAN BESAR SAYURAN
622	46314	PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO
623	46315	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI
624	46319	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA
625	46321	PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN
626	46322	PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN
627	46323	PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA
628	46324	PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN
629	46325	PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR
630	46326	PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU
631	46327	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI
632	46331	PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA
633	46332	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI
634	46335	PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU
635	46339	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA
636	46411	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL
637	46412	PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN
638	46413	PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI
639	46414	PERDAGANGAN BESAR BARANG LAINNYA DARI TEKSTIL
640	46419	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA
641	46422	PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK
642	46491	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA
643	46494	PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK
644	46496	PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK
645	46497	PERDAGANGAN BESAR PERHIASAN DAN JAM
646	46498	PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK
647	46499	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL
648	46512	PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK
649	46591	PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
650	46593	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
651	46599	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
652	46610	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI
653	46620	PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM
654	46692	PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA
655	46693	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN
656	46699	PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG
657	46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR
658	47111	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET/MINIMARKET
659	47112	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET/MINIMARKET (TRADISIONAL)
660	47191	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
661	47192	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)
662	47211	PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA
663	47212	PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN
664	47213	PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN
665	47214	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN
666	47215	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN
667	47216	PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN
668	47219	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA
669	47221	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL
670	47222	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL
671	47230	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO
672	47241	PERDAGANGAN ECERAN BERAS
673	47242	PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA
674	47243	PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH
675	47244	PERDAGANGAN ECERAN TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM
676	47245	PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN
677	47249	PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA
678	47301	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR KENDARAAN DI SPBU
679	47302	PERDAGANGAN ECERAN PREMIUM, PREMIX DAN SOLAR DI TOKO
680	47411	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA
681	47412	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DAN SEJENISNYA
682	47413	PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)
683	47414	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI
684	47415	PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR
685	47511	PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL
686	47512	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL
687	47513	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHIT
688	47521	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI
689	47522	PERDAGANGAN ECERAN KACA
690	47523	PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA
691	47524	PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU
692	47525	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN
693	47526	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU
694	47527	PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK
695	47528	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN
696	47529	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA
697	47530	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO
698	47591	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR
699	47592	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA
700	47593	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK
701	47594	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT
702	47595	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN
703	47596	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN
704	47597	PERDAGANGAN ECERAN ALAT MUSIK
705	47599	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM SUBGOLONGAN 4759
706	47611	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR
707	47612	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
708	47620	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO DI TOKO
709	47630	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO
710	47640	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO
711	47650	PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON
712	47711	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN
713	47712	PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA
714	47713	PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN
715	47714	PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA
716	47721	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA
717	47722	PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI DI APOTIK
718	47723	PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI BUKAN DI APOTIK
719	47724	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL
720	47725	PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK
721	47726	PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN
722	47727	PERDAGANGAN ECERAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)
723	47729	PERDAGANGAN ECERAN LAINNYA BUKAN YANG TERCAKUP PADA KELOMPOK 47721 S.D. 47727
724	47731	PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA
725	47732	PERDAGANGAN ECERAN ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA
726	47733	PERDAGANGAN ECERAN KACA MATA
727	47734	PERDAGANGAN ECERAN JAM
728	47735	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERHIASAN
729	47736	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR
730	47737	PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK
731	47739	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL
732	47746	PERDAGANGAN ECERAN BARANG ANTIK
733	47752	PERDAGANGAN ECERAN HEWAN TERNAK
734	47753	PERDAGANGAN ECERAN IKAN HIAS
735	47754	PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN HEWAN PIARAAN
736	47761	PERDAGANGAN ECERAN BUNGA POTONG/FLORIST
737	47762	PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN HIAS, BIBIT BUAH-BUAHAN DAN TANAMAN OBAT
738	47763	PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA
739	47781	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KAYU, BAMBU, ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA
740	47782	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KULIT, TULANG, TANDUK, GADING, BULU DAN BINATANG/HEWAN YANG DIAWETKAN
741	47783	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI LOGAM
742	47784	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KERAMIK
743	47785	PERDAGANGAN ECERAN LUKISAN
744	47789	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN LAINNYA
745	47811	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI PADI DAN PALAWIJA
746	47812	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI BUAH-BUAHAN
747	47813	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI SAYUR-SAYURAN
748	47814	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PETERNAKAN
749	47815	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERIKANAN
750	47816	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN
751	47819	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI TANAMAN HIAS DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA
752	47821	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BERAS

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
753	47822	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROTI, KUE KERING, KUE BASAH DAN SEJENISNYA
754	47823	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOPI, GULA PASIR, GULA MERAH DAN SEJENISNYA
755	47824	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM
756	47825	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR DAGING OLAHAN DAN BIOTA AIR OLAHAN
757	47826	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MINUMAN
758	47827	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROKOK DAN TEMBAKAU
759	47828	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAN TERNAK, PAKAN UNGGAS DAN PAKAN IKAN
760	47829	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI MAKANAN DAN MINUMAN YTDL
761	47831	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL
762	47832	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN
763	47833	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA
764	47834	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PELENGKAP PAKAIAN DAN BENANG
765	47841	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA
766	47842	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR FARMASI
767	47843	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR OBAT TRADISIONAL
768	47844	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOSMETIK
769	47845	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA
770	47846	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)
771	47849	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM DAN YBDI YTDL
772	47851	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KACA MATA
773	47852	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PERHIASAN
774	47853	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR JAM
775	47854	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA
776	47855	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR
777	47859	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KEPERLUAN PRIBADI LAINNYA
778	47861	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ELEKTRONIK
779	47862	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT DAN PERLENGKAPAN LISTRIK
780	47863	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK/MELAMIN
781	47864	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT
782	47865	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN
783	47866	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN
784	47867	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT KEBERSIHAN
785	47869	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA
786	47871	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, KARTON DAN BARANG DARI KERTAS
787	47872	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR
788	47873	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)
789	47874	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT OLAHRAGA DAN ALAT MUSIK

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
790	47875	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT FOTOGRAFI, ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA
791	47876	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MESIN KANTOR
792	47877	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI
793	47879	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR CAMPURAN KERTAS, KARTON, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS-MENULIS, ALAT GAMBAR, HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN LAINNYA
794	47881	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN
795	47882	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAINAN ANAK-ANAK
796	47883	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR LUKISAN
797	47891	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HEWAN HIDUP
798	47892	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, MINYAK PELUMAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA
799	47893	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ANTIK
800	47894	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA
801	47895	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN, ALAS KAKI, PERLENGKAPAN PAKAIAN DAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS
802	47896	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS
803	47897	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS CAMPURAN
804	47899	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA
805	49111	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG
806	49112	ANGKUTAN JALAN REL KHUSUS WISATA
807	49121	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG
808	49129	ANGKUTAN JALAN REL KHUSUS LAINNYA
809	49211	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP)
810	49212	ANGKUTAN BUS PERBATASAN
811	49213	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP)
812	49214	ANGKUTAN BUS KOTA
813	49215	ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA
814	49222	ANGKUTAN BUS PARIWISATA
815	49300	ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA
816	49411	ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS
817	49412	ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS
818	49413	ANGKUTAN PERKOTAAN
819	49414	ANGKUTAN PERDESAAN
820	49421	ANGKUTAN TAKSI
821	49422	ANGKUTAN SEWA
822	49423	ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG
823	49424	ANGKUTAN OJEK MOTOR
824	49425	ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK WISATA
825	49429	ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG
826	49431	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM
827	49432	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS
828	50111	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK PENUMPANG
829	50112	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG
830	50113	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK WISATA
831	50114	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG
832	50121	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK PENUMPANG
833	50122	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG
834	50123	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK WISATA
835	50131	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK BARANG
836	50132	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK BARANG
837	50133	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK BARANG
838	50134	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG
839	50141	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK BARANG

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
840	50142	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK BARANG
841	50211	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TETAP DAN TERATUR
842	50212	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK
843	50213	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR UNTUK
844	50214	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG
845	50215	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG
846	50216	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG
847	50217	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG
848	50218	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG
849	50219	ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN
850	50222	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS
851	50223	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA
852	50224	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG
853	50225	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG
854	50226	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG
855	50227	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG
856	50228	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG
857	50229	ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN
858	51101	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK PENUMPANG
859	51102	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG
860	51103	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL INTERNASIONAL UNTUK PENUMPANG
861	51104	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK PENUMPANG
862	51105	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG
863	51106	ANGKUTAN UDARA KHUSUS OLAHRAGA
864	51107	ANGKUTAN UDARA KHUSUS UNTUK WISATA
865	51109	ANGKUTAN UDARA KHUSUS LAINNYA
866	51201	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK BARANG
867	51202	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG
868	51203	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL INTERNASIONAL UNTUK BARANG
869	51204	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK BARANG
870	51205	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG
871	52101	PERGUDANGAN
872	52102	JASA COLD STORAGE
873	52103	JASA BOUNDED WAREHOUSING ATAU WILAYAH KAWASAN BERIKAT
874	52109	JASA PERGUDANGAN LAINNYA
875	52211	JASA TERMINAL DARAT
876	52213	JASA JALAN TOL
877	52219	JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA
878	52221	JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN LAUT
879	52222	JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN SUNGAI DAN DANAU
880	52223	JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN PENYEBERANGAN
881	52229	JASA PENUNJANG ANGKUTAN AIR LAINNYA
882	52230	JASA KEBANDARUDARAAN
883	52240	PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)
884	52291	JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT)
885	52292	JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD)

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
886	52299	JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL
887	53200	KURIR
888	55111	HOTEL BINTANG LIMA
889	55112	HOTEL BINTANG EMPAT
890	55113	HOTEL BINTANG TIGA
891	55114	HOTEL BINTANG DUA
892	55115	HOTEL BINTANG SATU
893	55120	HOTEL MELATI
894	55130	PONDOK WISATA (HOME STAY)
895	55191	PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL)
896	55192	BUMI PERKEMAHAN
897	55193	PERSINGGAHAN KARAVAN
898	55194	VILA
899	55195	APARTEMEN HOTEL
900	55199	PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA
901	55900	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA
902	56101	RESTORAN
903	56102	WARUNG MAKAN
904	56103	KEDAI MAKANAN
905	56104	PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP
906	56210	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)
907	56290	PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA
908	56301	BAR
909	56302	KELAB MALAM ATAU DISKOTIK YANG UTAMANYA MENYEDIAKAN MINUMAN
910	56303	RUMAH MINUM/KAFE
911	56304	KEDAI MINUMAN
912	56305	RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL
913	56306	PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP
914	58110	PENERBITAN BUKU
915	58120	PENERBITAN BUKU DIREKTORI DAN MAILING LIST
916	58130	PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL, BULETIN DAN MAJALAH
917	58190	PENERBITAN LAINNYA
918	58200	PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)
919	59111	PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH
920	59112	PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA
921	59121	PASCA PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH
922	59122	PASCA PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA
923	59131	DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH
924	59132	DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA
925	59140	KEGIATAN PEMUTARAN FILM
926	59201	PEREKAMAN SUARA
927	59202	PENERBITAN MUSIK DAN BUKU MUSIK
928	60101	PENYIARAN RADIO OLEH PEMERINTAH
929	60102	PENYIARAN RADIO OLEH SWASTA
930	60201	PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH PEMERINTAH
931	60202	PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH SWASTA
932	61991	TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK PENYIARAN
933	62010	KEGIATAN PEMROGRAMAN KOMPUTER
934	62090	KEGIATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA
935	63111	KEGIATAN PENGOLAHAN DATA
936	63120	PORTAL WEB
937	63911	KEGIATAN KANTOR BERITA OLEH PEMERINTAH
938	63912	KEGIATAN KANTOR BERITA OLEH SWASTA
939	65121	ASURANSI NON JIWA KONVENSIONAL
940	65122	ASURANSI NON JIWA SYARIAH
941	66197	JASA PENUKARAN MATA UANG (MONEY CHANGER)

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
942	68110	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA
943	68120	KAWASAN PARIWISATA
944	68200	REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
945	70201	JASA KONSULTAN PARIWISATA
946	70202	JASA KONSULTAN TRANSPORTASI
947	70209	KEGIATAN KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA
948	71100	JASA ARSITEKUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI
949	71202	JASA PENGUJIAN LABORATORIUM
950	71203	JASA INSPEKSI
951	71204	JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI
952	71205	JASA KALIBRASI/METROLOGI
953	71209	JASA ANALISIS DAN UJI TEKNIS LAINNYA
954	72102	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA
955	72201	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
956	72202	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUMANIORA
957	73100	PERIKLANAN
958	73200	PENELITIAN PASAR DAN JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT
959	74100	JASA PERANCANGAN KHUSUS
960	74201	JASA FOTOGRAFI
961	74902	JASA KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS
962	77100	JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA
963	77210	JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT REKREASI DAN OLAHRAGA
964	77295	JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT MUSIK
965	77301	JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI
966	77302	JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
967	77303	JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI AIR
968	77304	JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI UDARA
969	77306	JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL
970	79111	JASA AGEN PERJALANAN WISATA
971	79112	JASA AGEN PERJALANAN BUKAN WISATA
972	79120	JASA BIRO PERJALANAN WISATA
973	79910	JASA INFORMASI PARIWISATA
974	79920	JASA PRAMUWISATA
975	79990	JASA RESERVASI LAINNYA YBDI YTDL
976	82301	JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN
977	82302	JASA EVENT ORGANIZER
978	82920	JASA PENGEPAKAN
979	85111	JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH PEMERINTAH
980	85112	JASA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH PEMERINTAH
981	85121	JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
982	85122	JASA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
983	85210	JASA PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH PEMERINTAH
984	85220	JASA PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA
985	85230	JASA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN PEMERINTAH
986	85240	JASA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SWASTA
987	85311	JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR PEMERINTAH
988	85312	JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON GELAR PEMERINTAH
989	85321	JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR SWASTA

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
990	85322	JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON GELAR SWASTA
991	85410	JASA PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN REKREASI
992	85420	JASA PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
993	85430	JASA PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH
994	85491	JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN
995	85492	JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA
996	85493	JASA PENDIDIKAN BAHASA SWASTA
997	85494	JASA PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA
998	85495	JASA PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA
999	85496	JASA PENDIDIKAN AWAK PESAWAT DAN JASA ANGKUTAN UDARA KHUSUS PENDIDIKAN AWAK PESAWAT
1000	85497	JASA PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA
1001	85498	JASA PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI
1002	85499	JASA PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
1003	85500	JASA PENUNJANG PENDIDIKAN
1004	85601	JASA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH
1005	85602	JASA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
1006	85603	JASA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN SWASTA
1007	85604	JASA PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK
1008	86101	JASA RUMAH SAKIT PEMERINTAH
1009	86102	JASA PUSKESMAS
1010	86103	JASA RUMAH SAKIT SWASTA
1011	86104	JASA POLIKLINIK SWASTA
1012	86109	JASA RUMAH SAKIT LAINNYA
1013	90001	KEGIATAN SENI PERTUNJUKAN
1014	90002	KEGIATAN PEKERJA SENI
1015	90003	JASA PENUNJANG HIBURAN
1016	90004	JASA IMPRESARIAT BIDANG SENI
1017	90005	JURNALIS BERITA INDEPENDEN
1018	90009	KEGIATAN HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA
1019	91021	MUSEUM YANG DIKELOLA PEMERINTAH
1020	91022	MUSEUM YANG DIKELOLA SWASTA
1021	91023	PENINGGALAN SEJARAH YANG DIKELOLA PEMERINTAH
1022	91024	PENINGGALAN SEJARAH YANG DIKELOLA SWASTA
1023	91025	TAMAN BUDAYA
1024	91029	WISATA BUDAYA LAINNYA
1025	91031	KEGIATAN TAMAN KONSERVASI ALAM
1026	91032	TAMAN NASIONAL (TN)
1027	91033	TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA)
1028	91034	TAMAN WISATA ALAM (TWA)
1029	91035	HUTAN LINDUNG (HL), SUAKA MARGASATWA (SM), DAN CAGAR ALAM (CA)
1030	91036	TAMAN LAUT
1031	91037	TAMAN BURU DAN KEBUN BURU
1032	91039	KEGIATAN TAMAN KONSERVASI ALAM LAINNYA
1033	93112	LAPANGAN GOLF
1034	93113	GELANGGANG BOWLING
1035	93114	GELANGGANG RENANG
1036	93115	LAPANGAN SEPAK BOLA
1037	93116	LAPANGAN TENIS LAPANGAN
1038	93117	KEGIATAN PUSAT KEBUGARAN/FITNESS CENTER
1039	93118	SPORT CENTRE
1040	93119	KEGIATAN FASILITAS OLAHRAGA LAINNYA
1041	93191	PROMOTOR KEGIATAN OLAHRAGA
1042	93193	KEGIATAN PERBURUAN
1043	93199	KEGIATAN LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN OLAHRAGA

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
1044	93210	KEGIATAN TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN
1045	93221	PEMANDIAN ALAM
1046	93222	WISATA GUA
1047	93223	WISATA PETUALANGAN ALAM
1048	93229	DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA
1049	93231	WISATA AGRO
1050	93232	TAMAN REKREASI/TAMAN WISATA
1051	93233	KOLAM PEMANCINGAN
1052	93239	DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA
1053	93241	ARUNG JERAM
1054	93242	WISATA SELAM
1055	93243	DERMAGA MARINA
1056	93249	WISATA TIRTA LAINNYA
1057	93292	KARAOKE KELUARGA
1058	93293	USAHA ARENA PERMAINAN
1059	93299	KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL
1060	96122	SPA (SANTE PAR AQUA)
1061	96129	JASA KEBUGARAN LAINNYA
1062	49221	ANGKUTAN BUS KHUSUS

B. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

1. Tuan A (K/1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan April 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp16.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp330.000,00.

   Penghasilan bruto Tuan A yang disetahunkan Rp198.000.000,00 (Rp16.500.000,00 x 12). Karena masih dibawah Rp200.000.000,00 maka Tuan A dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP.

   a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulan April 2020:

Gaji dan tunjangan		Rp 16.500.000,00
Pengurangan:		
Biaya Jabatan/bulan	Rp500.000,00	
Iuran Pensiun/bulan	Rp330.000,00	
		(Rp 830.000,00)
Penghasilan Neto Sebulan		Rp 15.670.000,00
Penghasilan Neto Setahun		
12 x Rp15.670.000,00		Rp188.040.000,00
PTKP (K/1)		(Rp 63.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp125.040.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Setahun		
5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00		
15% x Rp75.040.000,00 = Rp 11.256.000,00		
		Rp 13.756.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan Rp13.756.000,00/12		Rp 1.146.333,00

   b. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan A bulan April 2020:

Gaji dan tunjangan	Rp16.500.000,00
Dikurangi iuran pensiun/bulan	(Rp 330.000,00)
Dikurangi PPh Pasal 21	(Rp 1.146.333,00)
Penghasilan setelah pajak	Rp 15.023.667,00
Ditambah PPh Pasal 21 DTP	Rp 1.146.333,00
Jumlah yang diterima	Rp16.170.000,00

2. Tuan B (K/0) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp21.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp420.000,00.

   Penghasilan bruto Tuan B yang disetahunkan Rp252.000.000,00 (Rp21.000.000,00 x 12). Karena telah melebihi Rp200.000.000,00 maka seluruh PPh Pasal 21 terutang pada bulan Mei 2020 tidak dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP. Atas penghasilan tersebut PPh Pasal 21 dipotong dan disetor oleh pemberi kerja.

3. Tuan C (K/1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp15.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp300.000,00, serta menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp10.000.000,00.

   Penghasilan bruto Tuan C yang bersifat tetap dan teratur berupa gaji dan tunjangan sebesar Rp15.000.000,00 sebulan yang disetahunkan sebesar Rp180.000.000,00 (Rp15.000.000,00 x 12). Karena masih dibawah Rp200.000.000,00 maka penghasilan Tuan C yang dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP hanya atas penghasilan gaji dan tunjangan bulanan.

   a. Penghitungan PPh Pasal 21 DTP bulan Mei 2020:

Gaji dan tunjangan		Rp 15.000.000,00
Pengurangan:		
Biaya Jabatan/bulan	Rp500.000,00	
Iuran Pensiun/bulan	Rp300.000,00	
		(Rp 800.000,00)
Penghasilan Neto Sebulan		Rp 14.200.000,00
Penghasilan Neto Setahun		
12 x Rp14.200.000,00		Rp170.400.000,00
PTKP (K/1)		(Rp 63.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp107.400.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Setahun		
5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00		
15% x Rp57.400.000,00 = Rp 8.610.000,00		
		Rp 11.110.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan		
Rp11.110.000,00/12		Rp 925.833,00

Atas PPh Pasal 21 DTP sebesar Rp925.833,00 diserahkan oleh pemberi kerja kepada Tuan C.

b. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas THR bulan Mei 2020:

Gaji dan tunjangan setahun		Rp 180.000.000,00
THR		Rp 10.000.000,00
Penghasilan bruto		Rp 190.000.000,00
Pengurangan:		
Biaya Jabatan setahun maksimal	Rp6.000.000,00	
Iuran Pensiun setahun	Rp3.600.000,00	
		(Rp 9.600.000,00)
Penghasilan Neto		Rp180.400.000,00
PTKP (K/1)		(Rp 63.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp117.400.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Setahun		
5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00		
15% x Rp67.400.000,00 = Rp10.110.000,00		
		Rp 12.610.000,00
PPh Pasal 21 atas THR:		
PPh 21 atas seluruh penghasilan (Gaji, tunjangan, dan THR)		Rp 12.610.000,00
PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap (Gaji dan tunjangan)		(Rp 11.110.000,00)
PPh Pasal 21 atas THR		Rp 1.500.000,00

Pemberi kerja memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 atas THR Tuan C sebesar Rp1.500.000,00.

c. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan C bulan Mei 2020:

Gaji dan tunjangan	Rp 15.000.000,00
THR	Rp 10.000.000,00
Dikurangi iuran pensiun/bulan	(Rp 300.000,00)
Dikurangi PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan	(Rp 2.425.833,00)
Penghasilan setelah pajak	Rp 22.274.167,00
Ditambah PPh Pasal 21 DTP	Rp 925.833,00
Jumlah yang diterima	Rp 23.200.000,00

4. Tuan D (K/1) pegawai tetap di PT X (industri kaca mata/KLU 32503), pada bulan Juli 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp15.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp300.000,00. PT X memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada Tuan D sebesar Rp1.000.000,00.

   Penghasilan bruto Tuan D yang disetahunkan Rp192.000.000,00 ((Rp15.000.000,00 + Rp1.000.000,00) x 12). Karena masih dibawah Rp200.000.000,00 maka Tuan D dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP.

   a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulan Juli 2020:

Gaji dan tunjangan		Rp 15.000.000,00
Tunjangan PPh Pasal 21		Rp 1.000.000,00
Penghasilan bruto		Rp 16.000.000,00
Pengurangan:		
Biaya Jabatan	Rp500.000,00	
Iuran Pensiun	Rp300.000,00	
		(Rp 800.000,00)
Penghasilan Neto Sebulan		Rp 15.200.000,00
Penghasilan Neto Setahun		
12 x Rp15.200.000,00		Rp 182.400.000,00
PTKP (K/1)		(Rp 63.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp119.400.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Setahun		
5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00		
15% x Rp69.400.000,00 = Rp 10.410.000,00		
		Rp 12.910.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan		
Rp12.910.000,00/12		Rp 1.075.833,00

   b. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan D bulan Juli 2020:

Gaji dan tunjangan	Rp15.000.000,00
Tunjangan PPh	Rp 1.000.000,00
Dikurangi iuran pensiun/bulan	(Rp 300.000,00)
Dikurangi PPh Pasal 21	(Rp 1.075.833,00)
Penghasilan setelah pajak	Rp14.624.167,00
Ditambah PPh Pasal 21 DTP	Rp 1.075.833,00
Jumlah yang diterima	Rp15.700.000,00

C. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) DAN/ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

Nomor : ..... (1)
Lampiran : ..... (2)
Hal : Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ..... (4)
NPWP : ..... (5)
Jabatan : ..... (6)
Bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak:
Nama : ..... (7)
NPWP : ..... (8)
Kode KLU : ..... (9)
Alamat : ..... (10)

memberitahukan: (11)

☐ Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP

☐ Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang terutang sebesar 30%

sebagaimana diatur dalam PMK ... Nomor ... untuk Masa Pajak ..... 2020 sampai dengan September 2020.

Demikian disampaikan.

....., ...2020 (12)

(13)

..... (14)

Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak:

(1) Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pemanfaatan PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak.
(2) Diisi dengan jumlah lampiran (Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan sebagai perusahaan KITE)
(3) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
(4) Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
(5) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
(6) Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
(7) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
(8) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
(9) Diisi dengan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
(10) Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
(11) Diisi dengan menandai kotak sesuai permohonan yang diajukan.
(12) Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pemanfaatan PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak.
(13) Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak.
(14) Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).

D. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) DAN/ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
..... (1)

Nomor : .....(2)
Perihal : Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Kepada Yth.
.....
..... (3)

Berkenaan dengan surat pemberitahuan yang Saudara ajukan Nomor .....(4) tanggal .....(5) dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....tentang..., Saudara tidak berhak untuk memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25*), dengan alasan:

☐ tidak termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....tentang.....

☐ tidak termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....tentang.....

☐ tidak termasuk Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.

☐ tidak termasuk Wajib Pajak yang mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.

Demikian kami sampaikan.

....., ... 20....(6)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(7)

Tanda Tangan

..... (8)

*) Pilih yang sesuai

Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Berhak/Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25:

(1) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
(2) Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
(3) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
(4) Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
(5) Diisi dengan tanggal surat permohonan.
(6) Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
(7) Diisi dengan KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
(8) Diisi dengan nama Kepala KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.

E. FORMULIR LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Wajib Pajak Pemberi Kerja : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Kode KLU : ..... (3)
Masa Pajak : ..... (4)

Jumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP	..... orang (5)
Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak 2020 (6)	Rp ..... (7)
Jumlah PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak 2020 (8)	Rp ..... (9)

Daftar pegawai yang telah menerima PPh Pasal 21 DTP:

No. (10)	Nama Pegawai (11)	NPWP (12)	NIK (13)	Jumlah (Rp) (14)	
				Pengh. Bruto	PPh Pasal 21 DTP
Jumlah				..... (7)	..... (9)

Demikian laporan disampaikan.

....., ... 2020 (15)

(16)

..... (17)
NPWP: ..... (18)

Petunjuk Pengisian Formulir Laporan Realisasi PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP):

(1) Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemberi Kerja.
(2) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemberi Kerja.
(3) Diisi dengan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
(4) Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.
(5) Diisi dengan jumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan.
(6) Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.
(7) Diisi dengan jumlah Rupiah Penghasilan Bruto yang diterima pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan.
(8) Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.
(9) Diisi dengan jumlah Rupiah PPh Pasal 21 DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan yang diberikan secara tunai kepada masing-masing pegawai yang berhak.
(10) Diisi dengan nomor urut.
(11) Diisi dengan nama pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan.
(12) Diisi dengan NPWP pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan.
(13) Diisi dengan NIK pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan.
(14) Diisi dengan jumlah Rupiah Penghasilan Bruto dan PPh Pasal 21 DTP tiap pegawai dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan.
(15) Diisi dengan tanggal laporan.
(16) Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak Pemberi Kerja atau Pengurus.
(17) Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemberi Kerja atau Pengurus (bagi Wajib Pajak Badan).
(18) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemberi Kerja atau Pengurus (bagi Wajib Pajak Badan).

F. CONTOH PENGHITUNGAN PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

1. Tuan S memiliki usaha apotek. Pada Tahun Pajak 2019, Tuan S memperoleh peredaran bruto dari usaha apotek sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Karena peredaran bruto yang diterima oleh Tuan S dari usaha apotek tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan dari usaha apotek untuk Tahun Pajak 2020 dikenai PPh final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

   Tuan S telah memiliki Surat Keterangan pada tanggal 18 Mei 2020. Peredaran bruto Tuan S dari Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Masa Pajak	Peredaran Bruto		PPh Final Terutang	
April 2020	Rp	40.500.000,00	Rp	202.500,00
Mei 2020	Rp	60.000.000,00	Rp	300.000,00
Juni 2020	Rp	75.000.000,00	Rp	375.000,00

   Atas PPh final Masa Pajak April 2020 sampai dengan Juni 2020 Tuan S berhak memperoleh insentif PPh final ditanggung Pemerintah dengan cara menyampaikan Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu paling lambat tanggal:

   a. 20 Mei 2020, untuk Masa Pajak April 2020;
   b. 20 Juni 2020, untuk Masa Pajak Mei 2020; dan
   c. 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak Juni 2020,

   sehingga Tuan S tidak menyetor PPh final ke kas negara.

2. PT ABC memiliki usaha bengkel mobil dan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 24 Januari 2019.
   Peredaran bruto yang diperoleh PT ABC pada Tahun Pajak 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga untuk Tahun Pajak 2020 PT ABC dikenai PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

   Pada bulan Mei 2020, PT ABC memberikan jasa perbaikan mobil kepada PT D sebesar Rp10.000.000,00 dan PT ABC dapat memberikan Surat Keterangan.

Pemotong telah melakukan konfirmasi dan diketahui bahwa Surat Keterangan tersebut terkonfirmasi sehingga PT D tidak melakukan pemotongan PPh final atas transaksi tersebut dan memberikan PPh final sebesar 0,5% secara tunai kepada PT ABC.

PT D memberikan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2020" dan PT ABC harus menyampaikan laporan realisasi atas PPh final ditanggung Pemerintah tersebut melalui saluran tertentu paling lambat tanggal 20 Juni 2020 untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah atas transaksi tersebut.

G. FORMULIR SURAT KETERANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK ..... (2)

SURAT KETERANGAN WAJIB PAJAK YANG PAJAK PENGHASILAN DIHITUNG DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

Nomor : KET- ... /PP23/WPJ ... /KP ... /20... (3)

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:
Nama : ..... (4)
NPWP : ..... (5)
Alamat : ..... (6)

memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018).

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal..... (7)
kecuali:
a. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); atau
b. Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Surat Keterangan ini juga dapat digunakan untuk memanfaatkan insentif PPh final ditanggung oleh Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan dalam PMK.../PMK.03/2020 sampai dengan Masa September 2020.

....., ...20.... (8)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor

.....(9)
NIP .....

Petunjuk pengisian Surat Keterangan:

(1) Diisi dengan Nama Kantor Wilayah DJP.

(2) Diisi dengan Nama Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak pusat terdaftar.

(3) Diisi dengan Nomor Surat Keterangan.

(4) Diisi dengan Nama Wajib Pajak.

(5) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

(6) Diisi dengan Alamat Wajib Pajak.

(7) Diisi dengan Tanggal akhir Tahun Pajak sesuai Pasal 5 ayat (1) PP 23/2018 atau tanggal akhir Tahun Pajak 2018 untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 PP 23/2018.

(8) Diisi dengan Tempat dan tanggal dibuatnya Surat Keterangan.

(9) Diisi dengan Nama dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak pusat terdaftar.

H. FORMULIR LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

Wajib Pajak : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Masa Pajak : ..... (3)

1. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

No.	Lokasi Usaha (4)	NPWP (5)	NPWP Pemotong atau Pemungut (6)	Peredaran Bruto (7)	PPh Final DTP (8)
1.					
2.					
3.					
Dst					
Jumlah					

2. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan pihak lainnya

No.	Lokasi Usaha (4)	NPWP (5)	Peredaran Bruto (9)	PPh Final DTP (10)
1.				
2.				
3.				
Dst				
Jumlah				

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., ... 2020 (11)

(12)

..... (13)

NPWP: ..... (14)

Petunjuk Pengisian Formulir Laporan Realisasi PPh Final Ditanggung Pemerintah:

(1) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
(2) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
(3) Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.
(4) Diisi dengan alamat lokasi usaha.
(5) Diisi dengan NPWP lokasi usaha.
(6) Diisi dengan NPWP Pemotong atau Pemungut Pajak.
(7) Diisi dengan jumlah Rupiah Peredaran Bruto dari transaksi dengan Pemotong atau Pemungut PPh dalam Masa Pajak periode pelaporan.
(8) Diisi dengan jumlah Rupiah PPh Final ditanggung Pemerintah dalam Masa Pajak periode pelaporan yang dibayarkan secara tunai oleh Pemotong atau Pemungut Pajak.
(9) Diisi dengan jumlah Rupiah seluruh Peredaran Bruto dalam Masa Pajak periode pelaporan.
(10) Diisi dengan jumlah Rupiah PPh Final ditanggung Pemerintah dalam Masa Pajak periode pelaporan.
(11) Diisi dengan tanggal laporan.
(12) Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak.
(13) Diisi dengan nama terang Wajib Pajak atau nama Pengurus bagi Wajib Pajak Badan.
(14) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau NPWP Pengurus bagi Wajib Pajak Badan.

I. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU) WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR, DAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PPN

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
1	10432	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
2	10520	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL
3	10710	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE
4	10740	INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA
5	10772	INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN
6	10801	INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN
7	10802	INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN
8	11040	INDUSTRI MINUMAN RINGAN
9	13112	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG
10	13113	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG JAHIT
11	13121	INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA)
12	13131	INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG
13	13132	INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN
14	13133	INDUSTRI PENCETAKAN KAIN
15	13911	INDUSTRI KAIN RAJUTAN
16	13921	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
17	13929	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA
18	13930	INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI
19	13942	INDUSTRI BARANG DARI TALI
20	13992	INDUSTRI YANG MENGHASILKAN KAIN KEPERLUAN INDUSTRI
21	13993	INDUSTRI NON WOVEN (BUKAN TENUNAN)
22	13999	INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL
23	14111	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL
24	14301	INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN
25	15114	INDUSTRI KULIT BUATAN/IMITASI
26	15121	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI
27	15201	INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI
28	17011	INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP)
29	17021	INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG
30	17022	INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON
31	17091	INDUSTRI KERTAS TISSUE
32	17099	INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA YTDL
33	18111	INDUSTRI PENCETAKAN UMUM
34	20111	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI
35	20113	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMEN
36	20114	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA
37	20115	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN
38	20116	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT WARNA DAN PIGMEN, ZAT WARNA DAN PIGMEN
39	20118	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS
40	20119	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA
41	20131	INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU PLASTIK
42	20211	INDUSTRI BAHAN BAKU PEMBERANTAS HAMA (BAHAN AKTIF)

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
43	20212	INDUSTRI PEMBERANTAS HAMA (FORMULASI)
44	20221	INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK
45	20231	INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA
46	20232	INDUSTRI BAHAN KOSMETIK DAN KOSMETIK, TERMASUK PASTA GIGI
47	20291	INDUSTRI PEREKAT/LEM
48	20299	INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL
49	21011	INDUSTRI BAHAN FARMASI
50	21012	INDUSTRI PRODUK FARMASI
51	22111	INDUSTRI BAN LUAR DAN BAN DALAM
52	22123	INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER)
53	22192	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI
54	22199	INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YTDL
55	22220	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN
56	22291	INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN
57	22299	INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNYA YTDL
58	23111	INDUSTRI KACA LEMBARAN
59	23922	INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK
60	23929	INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK BUKAN BATU BATA DAN GENTENG
61	23941	INDUSTRI SEMEN
62	24101	INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEEL MAKING)
63	24102	INDUSTRI PENGGILINGAN BAJA (STEEL ROLLING)
64	24103	INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI
65	24202	INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI
66	25111	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN
67	25112	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN
68	25113	INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BAJA UNTUK BANGUNAN
69	25119	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA
70	25910	INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK
71	25940	INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM
72	25951	INDUSTRI BARANG DARI KAWAT
73	25952	INDUSTRI PAKU, MUR DAN BAUT
74	25991	INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA
75	25992	INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA DARI LOGAM
76	25999	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL
77	26110	INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK
78	26320	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL (WIRELESS)
79	26390	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA
80	26410	INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI
81	26490	INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA
82	27112	INDUSTRI MESIN PEMBANGKIT LISTRIK
83	27113	INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (TRANSFORMATOR), PENGUBAH ARUS (RECTIFIER) DAN
84	27120	INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK
85	27201	INDUSTRI BATU BATERAI KERING (BATU BATERAI PRIMER)
86	27320	INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA
87	27401	INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR, LAMPU PENERANGAN TERPUSAT DAN LAMPU ULTRA VIOLET

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
88	27402	INDUSTRI LAMPU TABUNG GAS (LAMPU PEMBUANG LISTRIK)
89	27409	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LAINNYA
90	27510	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA
91	27520	INDUSTRI PERALATAN ELEKTROTERMAL RUMAH TANGGA
92	27900	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA
93	28130	INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN KLEP/KATUP
94	28140	INDUSTRI BEARING, RODA GIGI DAN ELEMEN PENGGERAK MESIN
95	28160	INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH
96	29100	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
97	29300	INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
98	30200	INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA
99	30911	INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA
100	30912	INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA
101	31001	INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU
102	31004	INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM
103	01269	PERKEBUNAN TANAMAN BUAH OLEAGINOUS LAINNYA
104	01412	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH
105	03111	PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI LAUT
106	03112	PENANGKAPAN CRUSTACEA DI LAUT
107	03113	PENANGKAPAN MOLLUSCA DI LAUT
108	03114	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN ALGAE (TUMBUHAN) DI LAUT
109	03115	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN BENIH IKAN LAUT
110	03116	PENANGKAPAN ECHINODERMATA DI LAUT
111	03117	PENANGKAPAN COELENTERATA DI LAUT
112	03118	PENANGKAPAN IKAN HIAS LAUT
113	03119	PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI LAUT
114	03121	PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN UMUM
115	03122	PENANGKAPAN CRUSTACEA DI PERAIRAN UMUM
116	03123	PENANGKAPAN MOLLUSCA DI PERAIRAN UMUM
117	03124	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN ALGAE DI PERAIRAN UMUM
118	03125	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN INDUK/BENIH IKAN DI PERAIRAN UMUM
119	03129	PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI PERAIRAN UMUM
120	03131	JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI LAUT
121	03132	JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI LAUT
122	03133	JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI LAUT
123	03141	JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM
124	03142	JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM
125	03143	JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM
126	03211	PEMBESARAN IKAN LAUT
127	03212	PEMBENIHAN IKAN LAUT
128	03213	BUDIDAYA IKAN HIAS LAUT
129	03214	BUDIDAYA KARANG (CORAL)
130	03221	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM
131	03222	BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA JARING APUNG
132	03223	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA
133	03224	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI SAWAH
134	03225	BUDIDAYA IKAN HIAS AIR TAWAR

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
135	03226	PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR
136	03231	JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT
137	03232	JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT
138	03241	JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN DI AIR TAWAR
139	03242	JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN DI AIR TAWAR
140	03243	JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN DI AIR TAWAR
141	03251	PEMBESARAN IKAN AIR PAYAU
142	03252	PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU
143	03261	JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU
144	03262	JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU
145	03263	JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU
146	05101	PERTAMBANGAN BATU BARA
147	06100	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI
148	06201	PERTAMBANGAN GAS ALAM
149	07101	PERTAMBANGAN PASIR BESI
150	07102	PERTAMBANGAN BIJIH BESI
151	07291	PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH
152	07292	PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH HITAM
153	07293	PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT
154	07294	PERTAMBANGAN BIJIH TEMBAGA
155	07295	PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL
156	07296	PERTAMBANGAN BIJIH MANGAN
157	07299	PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BIJIH BESI
158	07301	PERTAMBANGAN EMAS DAN PERAK
159	07309	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA LAINNYA
160	08999	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL
161	09100	JASA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM
162	09900	JASA PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA
163	10110	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS
164	10120	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS
165	10130	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS
166	10211	INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN IKAN
167	10212	INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN IKAN
168	10213	INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN
169	10214	INDUSTRI PEMINDANGAN IKAN
170	10215	INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI IKAN
171	10216	INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI
172	10217	INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN IKAN
173	10219	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN
174	10221	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR (BUKAN UDANG) DALAM KALENG
175	10222	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN UDANG DALAM KALENG
176	10291	INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN BIOTA AIR LAINNYA
177	10292	INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN BIOTA AIR LAINNYA
178	10293	INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA
179	10294	INDUSTRI PEMINDANGAN BIOTA AIR LAINNYA
180	10295	INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI BIOTA AIR LAINNYA
181	10296	INDUSTRI BERBASIS LUMATAN BIOTA AIR LAINNYA

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
182	10297	INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN BIOTA AIR LAINNYA
183	10299	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK BIOTA AIR LAINNYA
184	10414	INDUSTRI MINYAK IKAN
185	10431	INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPAN SAWIT (CRIUDE PALM OIL)
186	10510	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM
187	10611	INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN PADI-PADIAN DAN BIJI-BIJIAN
188	10612	INDUSTRI PENGUPASAN, PEMBERSIHAN DAN SORTASI KOPI
189	10621	INDUSTRI PATI UBI KAYU
190	10721	INDUSTRI GULA PASIR
191	10722	INDUSTRI GULA MERAH
192	10731	INDUSTRI KAKAO
193	10732	INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA
194	10733	INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING
195	10739	INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA
196	10750	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN
197	10761	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI DAN TEH
198	10773	INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA
199	10774	INDUSTRI PENGOLAHAN GARAM
200	10792	INDUSTRI KUE BASAH
201	10793	INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU
202	10794	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA
203	10799	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA
204	11030	INDUSTRI MINUMAN KERAS DARI MALT DAN MALT
205	13122	INDUSTRI KAIN TENUN IKAT
206	13123	INDUSTRI BULU TIRUAN TENUNAN
207	13134	INDUSTRI BATIK
208	13912	INDUSTRI KAIN SULAMAN/BORDIR
209	13913	INDUSTRI BULU TIRUAN RAJUTAN
210	13922	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN
211	13923	INDUSTRI BANTAL DAN SEJENISNYA
212	13924	INDUSTRI BARANG JADI RAJUTAN DAN SULAMAN
213	13995	INDUSTRI KARUNG GONI
214	13996	INDUSTRI KARUNG BUKAN GONI
215	14112	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI KULIT
216	14120	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN
217	14131	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL
218	14132	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI KULIT
219	14200	INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU
220	14302	INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BORDIR
221	14303	INDUSTRI RAJUTAN KAOS KAKI DAN SEJENISNYA
222	15123	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN HEWAN
223	15129	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN LAINNYA
224	15202	INDUSTRI SEPATU OLAHRAGA
225	15203	INDUSTRI SEPATU TEKNIK LAPANGAN/KEPERLUAN INDUSTRI
226	15209	INDUSTRI ALAS KAKI LAINNYA
227	16101	INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
228	16211	INDUSTRI KAYU LAPIS
229	16212	INDUSTRI KAYU LAPIS LAMINASI, TERMASUK DECORATIVE PLYWOOD
230	16213	INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA
231	16214	INDUSTRI VENEER
232	16221	INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU
233	16222	INDUSTRI BANGUNAN PRAFABRIKASI DARI KAYU
234	16230	INDUSTRI WADAH DARI KAYU
235	16291	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU
236	16292	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN BUKAN ROTAN DAN BAMBU
237	16293	INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER
238	16294	INDUSTRI ALAT DAPUR DARI KAYU, ROTAN DAN BAMBU
239	16299	INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL
240	18112	INDUSTRI PENCETAKAN KHUSUS
241	18120	JASA PENUNJANG PENCETAKAN
242	18201	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN SUARA DAN PIRANTI LUNAK
243	18202	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO
244	19211	INDUSTRI PEMURNIAN DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI
245	19212	INDUSTRI PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN GAS ALAM
246	19213	INDUSTRI PEMBUATAN MINYAK PELUMAS
247	20112	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI
248	20117	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI MINYAK BUMI, GAS ALAM DAN BATU BARA
249	23121	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA DARI KACA
250	23123	INDUSTRI KEMASAN DARI KACA
251	23129	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KACA
252	23931	INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI PORSELEN
253	23932	INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT/KERAMIK
254	23951	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN
255	23959	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN, KAPUR, GIPS DAN ASBES LAINNYA
256	23961	INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN
257	23963	INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN
258	25920	JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI PENGERJAAN KHUSUS LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM
259	25995	INDUSTRI LAMPU DARI LOGAM
260	26120	INDUSTRI SEMI KONDUKTOR DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA
261	26800	INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK
262	27403	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN UNTUK ALAT TRANSPORTASI
263	28291	INDUSTRI MESIN PERCETAKAN
264	30111	INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU
265	30112	INDUSTRI BANGUNAN LEPAS PANTAI DAN BANGUNAN TERAPUNG
266	30113	INDUSTRI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN BAGIAN KAPAL
267	31002	INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU
268	31003	INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK
269	31009	INDUSTRI FURNITUR LAINNYA
270	32111	INDUSTRI PERMATA
271	32112	INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI
272	32113	INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA BUKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
273	32115	INDUSTRI PERHIASAN MUTIARA
274	32119	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI LOGAM MULIA
275	32120	INDUSTRI PERHIASAN IMITASI DAN BARANG SEJENIS
276	32201	INDUSTRI ALAT MUSIK TRADISIONAL
277	32202	INDUSTRI ALAT MUSIK BUKAN TRADISIONAL
278	32300	INDUSTRI ALAT OLAHRAGA
279	32401	INDUSTRI ALAT PERMAINAN
280	32402	INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK
281	32903	INDUSTRI KERAJINAN YTDL
282	32909	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL
283	33122	JASA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS
284	33152	JASA REPARASI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA
285	35201	PENGADAAN GAS ALAM DAN BUATAN
286	35202	DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN
287	38302	DAUR ULANG BARANG BUKAN LOGAM
288	41011	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL
289	41012	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN
290	41013	KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI
291	41014	KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN
292	41015	KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN
293	41016	KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN
294	41017	KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN
295	41018	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN
296	41019	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA
297	41020	PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI GEDUNG
298	42111	KONSTRUKSI JALAN RAYA
299	42112	KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG
300	42113	KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG
301	42114	KONSTRUKSI JALAN KERETA API DAN JEMBATAN KERETA API
302	42115	KONSTRUKSI TEROWONGAN
303	42120	PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API
304	42211	KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI
305	42212	KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE
306	42213	KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL
307	42214	KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI SARANA BANTU NAVIGASI LAUT DAN RAMBU SUNGAI
308	42215	KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI NAVIGASI UDARA
309	42216	KONSTRUKSI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API
310	42217	KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI
311	42218	PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH
312	42219	KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA
313	42220	PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH
314	42911	KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR
315	42912	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN
316	42913	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN
317	42914	KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN DAN PENAMPUNGAN BARANG MINYAK DAN GAS

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
318	42915	PENGERUKAN
319	42919	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL
320	42920	PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA
321	43110	PEMBONGKARAN
322	43120	PENYIAPAN LAHAN
323	43211	INSTALASI LISTRIK
324	43212	INSTALASI TELEKOMUNIKASI
325	43213	INSTALASI NAVIGASI LAUT DAN SUNGAI
326	43214	INSTALASI NAVIGASI UDARA
327	43215	INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API
328	43216	INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA
329	43217	INSTALASI ELEKTRONIKA
330	43221	INSTALASI AIR (PIPA)
331	43222	INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL
332	43223	INSTALASI MINYAK DAN GAS
333	43224	INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA
334	43291	INSTALASI MEKANIKAL
335	43299	INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL
336	43301	PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMUNIUM
337	43302	PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON
338	43303	PENGECATAN
339	43304	DEKORASI INTERIOR
340	43305	DEKORASI EKSTERIOR
341	43309	PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA
342	43901	PEMASANGAN PONDASI DAN PILAR
343	43902	PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER)
344	43903	PEMASANGAN ATAP/ROOF COVERING
345	43904	PEMASANGAN KERANGKA BAJA
346	43905	PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR
347	43909	KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL
348	46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
349	46204	PERDAGANGAN BESAR TEMBAKAU RAJANGAN
350	46209	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA
351	46326	PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU
352	46591	PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
353	46692	PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA
354	46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR
355	47216	PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN
356	47411	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA
357	47412	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DAN SEJENISNYA
358	47413	PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)
359	47414	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI
360	47415	PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR
361	47513	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHIT
362	47521	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI
363	47522	PERDAGANGAN ECERAN KACA

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
364	47523	PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA
365	47524	PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU
366	47525	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN
367	47526	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU
368	47527	PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK
369	47528	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN
370	47529	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA
371	47592	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA
372	47593	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK
373	47599	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM SUBGOLONGAN 4759
374	47611	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR
375	47630	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO
376	47640	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO
377	47650	PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON
378	47721	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA
379	47722	PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI DI APOTIK
380	47723	PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI BUKAN DI APOTIK
381	47724	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL
382	47726	PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN
383	47729	PERDAGANGAN ECERAN LAINNYA BUKAN YANG TERCAKUP PADA KELOMPOK 47721 S.D. 47727
384	47731	PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA
385	47732	PERDAGANGAN ECERAN ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA
386	47733	PERDAGANGAN ECERAN KACA MATA
387	47734	PERDAGANGAN ECERAN JAM
388	47736	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR
389	47737	PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK
390	47739	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL
391	47754	PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN HEWAN PIARAAN
392	47763	PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA
393	47816	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN
394	47828	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAN TERNAK, PAKAN UNGGAS DAN PAKAN IKAN
395	47841	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA
396	47842	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR FARMASI
397	47843	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR OBAT TRADISIONAL
398	47845	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA
399	47846	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)
400	47849	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM DAN YBDI YTDL
401	47851	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KACA MATA
402	47853	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR JAM
403	47855	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
404	47859	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KEPERLUAN PRIBADI LAINNYA
405	47861	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ELEKTRONIK
406	47862	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT DAN PERLENGKAPAN LISTRIK
407	47863	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK/MELAMIN
408	47864	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT
409	47865	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN
410	47866	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN
411	47867	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT KEBERSIHAN
412	47869	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA
413	47871	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, KARTON DAN BARANG DARI KERTAS
414	47872	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR
415	47873	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)
416	47874	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT OLAHRAGA DAN ALAT MUSIK
417	47875	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT FOTOGRAFI, ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA
418	47876	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MESIN KANTOR
419	47877	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI
420	47879	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR CAMPURAN KERTAS, KARTON, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS-MENULIS, ALAT GAMBAR, HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN LAINNYA
421	47882	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAINAN ANAK-ANAK
422	47891	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HEWAN HIDUP
423	47894	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA
424	47895	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN, ALAS KAKI, PERLENGKAPAN PAKAIAN DAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS
425	47896	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS
426	47897	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS CAMPURAN
427	47899	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA
428	52219	JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA
429	52292	JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD)
430	52299	JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL
431	68120	KAWASAN PARIWISATA

J. FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR

Nomor : .....(1)
Lampiran : .....(2)
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(4)

NPWP : .....(5)

Jabatan : .....(6)

Bertindak selaku: ☐ Wajib Pajak

☐ Pengurus dari Wajib Pajak

Nama : .....(7)

NPWP : .....(8)

Kode KLU : .....(9)

Alamat : .....(10)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....tentang..., dengan alasan*):

☐ termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....tentang.....

☐ termasuk Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (melampirkan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan sebagai Perusahaan KITE).

☐ termasuk Wajib Pajak yang mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB (melampirkan Keputusan Menteri Keuangan tentang izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB).

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

....., ... 20....(11)

Pemohon,

.....(12)

*) Pilih salah satu

Petunjuk Pengisian Formulir Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor:

(1) Diisi dengan nomor surat permohonan
(2) Diisi dengan jumlah lampiran
(3) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
(4) Diisi dengan nama pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan)
(5) Diisi dengan NPWP pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan)
(6) Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan)
(7) Diisi dengan nama Wajib Pajak
(8) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
(9) Diisi dengan kode KLU Wajib Pajak
(10) Diisi dengan alamat Wajib Pajak
(11) Diisi dengan tanggal permohonan
(12) Diisi dengan nama terang pemohon

K. FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
..... (1)

SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR
NOMOR : .....(2)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....(1) menerangkan bahwa orang pribadi/badan *) tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : .....(3)
NPWP : .....(4)
Kode KLU : .....(5)
Alamat : .....(6)

dibebaskan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....tentang....., dengan alasan*):

☐ termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....tentang.....

☐ termasuk Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.

☐ termasuk Wajib Pajak yang mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020.

Kode verifikasi:

*) Pilih salah satu

Petunjuk Pengisian Formulir Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor:

(1) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak penerbit Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor
(2) Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor
(3) Diisi dengan nama Wajib Pajak
(4) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
(5) Diisi dengan kode KLU Wajib Pajak
(6) Diisi dengan alamat Wajib Pajak

L. FORMULIR PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
..... (1)

Nomor : .....(2)
Perihal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan
Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Kepada Yth.
.....
..... (3)

Berkenaan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor yang Saudara ajukan Nomor .....(4) tanggal .....(5) dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....tentang..., permohonan Saudara tidak disetujui dengan alasan*):

☐ tidak termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....tentang.....

☐ tidak termasuk Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.

☐ tidak termasuk Wajib Pajak yang mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.

Demikian kami sampaikan.

Kode verifikasi:

*) Pilih salah satu

Petunjuk Pengisian Formulir Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor :

(1) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
(2) Diisi dengan nomor Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas
(3) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan
(4) Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Keterangan Bebas
(5) Diisi dengan tanggal surat permohonan

M. FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR

LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Nama Wajib Pajak : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Kode KLU : .....(3)
Masa Pajak : .....(4)

Daftar rincian impor yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor

No. (5)	Nomor PIB**) (6)	Tanggal PIB (7)	April/Juli*)		Mei/Agustus*)		Juni/September*)	
			Nilai Impor**)	PPh 22 Impor	Nilai Impor***)	PPh 22 Impor	Nilai Impor***)	PPh 22 Impor
	Jumlah (8)							

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., ... 2020 (9)

(10)

..... (11)
NPWP..... (12)

*) : dicoret salah satu sesuai periode pelaporan.

**) : Nomor PIB atau dokumen yang dipersamakan dengan dokumen pabean impor.

***) : Nilai impor adalah *Cost Insurance, and Freight* (CIF) ditambah Bea Masuk dan pungutan lainnya berdasarkan ketentuan di bidang kepabeanan (contoh: dokumen BC 2.0, BC 2.5, BC 2.8, dan lain sebagainya).

Petunjuk Pengisian Formulir Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor:

(1) Diisi dengan Wajib Pajak yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor dalam periode pelaporan.
(2) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor dalam periode pelaporan.
(3) Diisi dengan kode KLU Wajib Pajak.
(4) Diisi dengan sesuai periode pelaporan, yaitu Masa Pajak April 2020 s.d. Masa Pajak Juni 2020 atau Masa Pajak Juli 2020 s.d. Masa Pajak September 2020.
(5) Diisi dengan nomor urut.
(6) Diisi dengan Nomor Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
(7) Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
(8) Diisi dengan penjumlahan nilai impor dan nilai PPh Pasal 22 impor yang dibebaskan dalam setiap periode pelaporan.
(9) Diisi dengan tanggal laporan.
(10) Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak yang membuat laporan.
(11) Diisi dengan nama terang Wajib Pajak yang membuat laporan.
(12) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang membuat laporan.

N. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU) WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
1	10432	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
2	10520	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL
3	10710	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE
4	10740	INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA
5	10772	INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN
6	10801	INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN
7	10802	INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN
8	11040	INDUSTRI MINUMAN RINGAN
9	13112	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG
10	13113	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG JAHIT
11	13121	INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA)
12	13131	INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG
13	13132	INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN
14	13133	INDUSTRI PENCETAKAN KAIN
15	13911	INDUSTRI KAIN RAJUTAN
16	13921	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
17	13929	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA
18	13930	INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI
19	13942	INDUSTRI BARANG DARI TALI
20	13992	INDUSTRI YANG MENGHASILKAN KAIN KEPERLUAN INDUSTRI
21	13993	INDUSTRI NON WOVEN (BUKAN TENUNAN)
22	13999	INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL
23	14111	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL
24	14301	INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN
25	15114	INDUSTRI KULIT BUATAN/IMITASI
26	15121	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI
27	15201	INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI
28	17011	INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP)
29	17021	INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG
30	17022	INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON
31	17091	INDUSTRI KERTAS TISSUE
32	17099	INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA YTDL
33	18111	INDUSTRI PENCETAKAN UMUM
34	20111	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI
35	20113	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMEN
36	20114	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA
37	20115	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN
38	20116	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT WARNA DAN PIGMEN, ZAT WARNA DAN PIGMEN
39	20118	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS
40	20119	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA
41	20131	INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU PLASTIK
42	20211	INDUSTRI BAHAN BAKU PEMBERANTAS HAMA (BAHAN AKTIF)

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
43	20212	INDUSTRI PEMBERANTAS HAMA (FORMULASI)
44	20221	INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK
45	20231	INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA
46	20232	INDUSTRI BAHAN KOSMETIK DAN KOSMETIK, TERMASUK PASTA GIGI
47	20291	INDUSTRI PEREKAT/LEM
48	20299	INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL
49	21011	INDUSTRI BAHAN FARMASI
50	21012	INDUSTRI PRODUK FARMASI
51	22111	INDUSTRI BAN LUAR DAN BAN DALAM
52	22123	INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER)
53	22192	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI
54	22199	INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YTDL
55	22220	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN
56	22291	INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN
57	22299	INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNYA YTDL
58	23111	INDUSTRI KACA LEMBARAN
59	23922	INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK
60	23929	INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK BUKAN BATU BATA DAN GENTENG
61	23941	INDUSTRI SEMEN
62	24101	INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEEL MAKING)
63	24102	INDUSTRI PENGGILINGAN BAJA (STEEL ROLLING)
64	24103	INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI
65	24202	INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI
66	25111	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN
67	25112	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN
68	25113	INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BAJA UNTUK BANGUNAN
69	25119	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA
70	25910	INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK
71	25940	INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM
72	25951	INDUSTRI BARANG DARI KAWAT
73	25952	INDUSTRI PAKU, MUR DAN BAUT
74	25991	INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA
75	25992	INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA DARI LOGAM
76	25999	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL
77	26110	INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK
78	26320	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL (WIRELESS)
79	26390	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA
80	26410	INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI
81	26490	INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA
82	27112	INDUSTRI MESIN PEMBANGKIT LISTRIK
83	27113	INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (TRANSFORMATOR), PENGUBAH ARUS (RECTIFIER) DAN
84	27120	INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK
85	27201	INDUSTRI BATU BATERAI KERING (BATU BATERAI PRIMER)
86	27320	INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA
87	27401	INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR, LAMPU PENERANGAN TERPUSAT DAN LAMPU ULTRA VIOLET

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
88	27402	INDUSTRI LAMPU TABUNG GAS (LAMPU PEMBUANG LISTRIK)
89	27409	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LAINNYA
90	27510	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA
91	27520	INDUSTRI PERALATAN ELEKTROTERMAL RUMAH TANGGA
92	27900	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA
93	28130	INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN KLEP/KATUP
94	28140	INDUSTRI BEARING, RODA GIGI DAN ELEMEN PENGGERAK MESIN
95	28160	INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH
96	29100	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
97	29300	INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
98	30200	INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA
99	30911	INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA
100	30912	INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA
101	31001	INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU
102	31004	INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM
103	01111	PERTANIAN TANAMAN JAGUNG
104	01112	PERTANIAN TANAMAN GANDUM
105	01113	PERTANIAN TANAMAN KEDELAI
106	01114	PERTANIAN TANAMAN KACANG TANAH
107	01115	PERTANIAN TANAMAN KACANG HIJAU
108	01120	PERTANIAN PADI
109	01132	PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA BUAH
110	01133	PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA SAYURAN BUAH
111	01134	PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA SAYURAN UMBI
112	01135	PERTANIAN TANAMAN UMBI-UMBIAN PALAWIJA
113	01136	PERTANIAN TANAMAN JAMUR
114	01139	PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA SAYURAN LAINNYA
115	01140	PERKEBUNAN TEBU
116	01150	PERKEBUNAN TEMBAKAU
117	01193	PERTANIAN TANAMAN BUNGA
118	01194	PERTANIAN PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA
119	01220	PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS
120	01230	PERTANIAN BUAH JERUK
121	01261	PERKEBUNAN BUAH KELAPA
122	01262	PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT
123	01269	PERKEBUNAN TANAMAN BUAH OLEAGINOUS LAINNYA
124	01270	PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN
125	01281	PERKEBUNAN LADA
126	01282	PERKEBUNAN CENGKEH
127	01284	PERKEBUNAN TANAMAN AROMATIK/PENYEGAR
128	01285	PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG
129	01286	PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NON RIMPANG
130	01289	PERTANIAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, NARKOTIK DAN OBAT LAINNYA
131	01291	PERKEBUNAN KARET DAN TANAMAN PENGHASIL GETAH LAINNYA
132	01301	PERTANIAN TANAMAN HIAS BUKAN TANAMAN BUNGA
133	01302	PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN HOLTIKULTURA LAINNYA BUKAN BUNGA
134	01411	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
135	01412	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH
136	01413	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU POTONG
137	01461	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING
138	01462	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR
139	01611	JASA PENGOLAHAN LAHAN
140	01612	JASA PEMUPUKAN, PENANAMAN BIBIT/BENIH DAN PENGENDALIAN JASAD PENGGANGGU
141	01613	JASA PEMANENAN
142	01614	JASA PENYEMPROTAN DAN PENYERBUKAN MELALUI UDARA
143	01619	JASA PENUNJANG PERTANIAN LAINNYA
144	01621	JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK
145	01622	JASA PEMACEKAN TERNAK
146	01623	JASA PENETASAN TELUR
147	01629	JASA PENUNJANG PETERNAKAN LAINNYA
148	01630	JASA PASCA PANEN
149	02111	PENGUSAHAAN HUTAN JATI
150	02120	PENGUSAHAAN HUTAN ALAM
151	02301	PEMUNGUTAN GETAH KARET
152	03111	PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI LAUT
153	03112	PENANGKAPAN CRUSTACEA DI LAUT
154	03113	PENANGKAPAN MOLLUSCA DI LAUT
155	03114	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN ALGAE (TUMBUHAN) DI LAUT
156	03115	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN BENIH IKAN LAUT
157	03116	PENANGKAPAN ECHINODERMATA DI LAUT
158	03117	PENANGKAPAN COELENTERATA DI LAUT
159	03118	PENANGKAPAN IKAN HIAS LAUT
160	03119	PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI LAUT
161	03121	PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN UMUM
162	03122	PENANGKAPAN CRUSTACEA DI PERAIRAN UMUM
163	03123	PENANGKAPAN MOLLUSCA DI PERAIRAN UMUM
164	03124	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN ALGAE DI PERAIRAN UMUM
165	03125	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN INDUK/BENIH IKAN DI PERAIRAN UMUM
166	03129	PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI PERAIRAN UMUM
167	03131	JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI LAUT
168	03132	JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI LAUT
169	03133	JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI LAUT
170	03141	JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM
171	03142	JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM
172	03143	JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM
173	03211	PEMBESARAN IKAN LAUT
174	03212	PEMBENIHAN IKAN LAUT
175	03213	BUDIDAYA IKAN HIAS LAUT
176	03214	BUDIDAYA KARANG (CORAL)
177	03221	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM
178	03222	BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA JARING APUNG
179	03223	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA
180	03224	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI SAWAH
181	03225	BUDIDAYA IKAN HIAS AIR TAWAR
182	03226	PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
183	03231	JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT
184	03232	JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT
185	03241	JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN DI AIR TAWAR
186	03242	JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN DI AIR TAWAR
187	03243	JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN DI AIR TAWAR
188	03251	PEMBESARAN IKAN AIR PAYAU
189	03252	PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU
190	03261	JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU
191	03262	JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU
192	03263	JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU
193	05101	PERTAMBANGAN BATU BARA
194	06100	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI
195	06201	PERTAMBANGAN GAS ALAM
196	07101	PERTAMBANGAN PASIR BESI
197	07102	PERTAMBANGAN BIJIH BESI
198	07291	PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH
199	07292	PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH HITAM
200	07293	PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT
201	07294	PERTAMBANGAN BIJIH TEMBAGA
202	07295	PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL
203	07296	PERTAMBANGAN BIJIH MANGAN
204	07299	PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BIJIH BESI
205	07301	PERTAMBANGAN EMAS DAN PERAK
206	07309	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA LAINNYA
207	08999	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL
208	09100	JASA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM
209	09900	JASA PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA
210	10110	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS
211	10120	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS
212	10130	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS
213	10211	INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN IKAN
214	10212	INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN IKAN
215	10213	INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN
216	10214	INDUSTRI PEMINDANGAN IKAN
217	10215	INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI IKAN
218	10216	INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI
219	10217	INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN IKAN
220	10219	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN
221	10221	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR (BUKAN UDANG) DALAM KALENG
222	10222	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN UDANG DALAM KALENG
223	10291	INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN BIOTA AIR LAINNYA
224	10292	INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN BIOTA AIR LAINNYA
225	10293	INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA
226	10294	INDUSTRI PEMINDANGAN BIOTA AIR LAINNYA
227	10295	INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI BIOTA AIR LAINNYA
228	10296	INDUSTRI BERBASIS LUMATAN BIOTA AIR LAINNYA
229	10297	INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN BIOTA AIR LAINNYA

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
230	10299	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK BIOTA AIR LAINNYA
231	10414	INDUSTRI MINYAK IKAN
232	10431	INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPAN SAWIT (CRIUDE PALM OIL)
233	10510	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM
234	10611	INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN PADI-PADIAN DAN BIJI-BIJIAN
235	10612	INDUSTRI PENGUPASAN, PEMBERSIHAN DAN SORTASI KOPI
236	10621	INDUSTRI PATI UBI KAYU
237	10721	INDUSTRI GULA PASIR
238	10722	INDUSTRI GULA MERAH
239	10731	INDUSTRI KAKAO
240	10732	INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA
241	10733	INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING
242	10739	INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA
243	10750	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN
244	10761	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI DAN TEH
245	10773	INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA
246	10774	INDUSTRI PENGOLAHAN GARAM
247	10792	INDUSTRI KUE BASAH
248	10793	INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU
249	10794	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA
250	10799	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA
251	11030	INDUSTRI MINUMAN KERAS DARI MALT DAN MALT
252	13122	INDUSTRI KAIN TENUN IKAT
253	13123	INDUSTRI BULU TIRUAN TENUNAN
254	13134	INDUSTRI BATIK
255	13912	INDUSTRI KAIN SULAMAN/BORDIR
256	13913	INDUSTRI BULU TIRUAN RAJUTAN
257	13922	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN
258	13923	INDUSTRI BANTAL DAN SEJENISNYA
259	13924	INDUSTRI BARANG JADI RAJUTAN DAN SULAMAN
260	13995	INDUSTRI KARUNG GONI
261	13996	INDUSTRI KARUNG BUKAN GONI
262	14112	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI KULIT
263	14120	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN
264	14131	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL
265	14132	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI KULIT
266	14200	INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU
267	14302	INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BORDIR
268	14303	INDUSTRI RAJUTAN KAOS KAKI DAN SEJENISNYA
269	15123	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN HEWAN
270	15129	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN LAINNYA
271	15202	INDUSTRI SEPATU OLAHRAGA
272	15203	INDUSTRI SEPATU TEKNIK LAPANGAN/KEPERLUAN INDUSTRI
273	15209	INDUSTRI ALAS KAKI LAINNYA
274	16101	INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU
275	16211	INDUSTRI KAYU LAPIS

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
276	16212	INDUSTRI KAYU LAPIS LAMINASI, TERMASUK DECORATIVE PLYWOOD
277	16213	INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA
278	16214	INDUSTRI VENEER
279	16221	INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU
280	16222	INDUSTRI BANGUNAN PRAFABRIKASI DARI KAYU
281	16230	INDUSTRI WADAH DARI KAYU
282	16291	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU
283	16292	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN BUKAN ROTAN DAN BAMBU
284	16293	INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER
285	16294	INDUSTRI ALAT DAPUR DARI KAYU, ROTAN DAN BAMBU
286	16299	INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL
287	18112	INDUSTRI PENCETAKAN KHUSUS
288	18120	JASA PENUNJANG PENCETAKAN
289	18201	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN SUARA DAN PIRANTI LUNAK
290	18202	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO
291	19211	INDUSTRI PEMURNIAN DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI
292	19212	INDUSTRI PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN GAS ALAM
293	19213	INDUSTRI PEMBUATAN MINYAK PELUMAS
294	20112	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI
295	20117	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI MINYAK BUMI, GAS ALAM DAN BATU BARA
296	23121	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA DARI KACA
297	23123	INDUSTRI KEMASAN DARI KACA
298	23129	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KACA
299	23931	INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI PORSELEN
300	23932	INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT/KERAMIK
301	23951	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN
302	23959	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN, KAPUR, GIPS DAN ASBES LAINNYA
303	23961	INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN
304	23963	INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN
305	25920	JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI PENGERJAAN KHUSUS LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM
306	25995	INDUSTRI LAMPU DARI LOGAM
307	26120	INDUSTRI SEMI KONDUKTOR DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA
308	26800	INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK
309	27403	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN UNTUK ALAT TRANSPORTASI
310	28291	INDUSTRI MESIN PERCETAKAN
311	30111	INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU
312	30112	INDUSTRI BANGUNAN LEPAS PANTAI DAN BANGUNAN TERAPUNG
313	30113	INDUSTRI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN BAGIAN KAPAL
314	31002	INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU
315	31003	INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK
316	31009	INDUSTRI FURNITUR LAINNYA
317	32111	INDUSTRI PERMATA
318	32112	INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI
319	32113	INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA BUKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI
320	32115	INDUSTRI PERHIASAN MUTIARA

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
321	32119	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI LOGAM MULIA
322	32120	INDUSTRI PERHIASAN IMITASI DAN BARANG SEJENIS
323	32201	INDUSTRI ALAT MUSIK TRADISIONAL
324	32202	INDUSTRI ALAT MUSIK BUKAN TRADISIONAL
325	32300	INDUSTRI ALAT OLAHRAGA
326	32401	INDUSTRI ALAT PERMAINAN
327	32402	INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK
328	32903	INDUSTRI KERAJINAN YTDL
329	32909	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL
330	33122	JASA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS
331	33152	JASA REPARASI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA
332	35101	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
333	35201	PENGADAAN GAS ALAM DAN BUATAN
334	35202	DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN
335	38302	DAUR ULANG BARANG BUKAN LOGAM
336	41011	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL
337	41012	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN
338	41013	KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI
339	41014	KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN
340	41015	KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN
341	41016	KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN
342	41017	KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN
343	41018	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN
344	41019	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA
345	41020	PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI GEDUNG
346	42111	KONSTRUKSI JALAN RAYA
347	42112	KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG
348	42113	KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG
349	42114	KONSTRUKSI JALAN KERETA API DAN JEMBATAN KERETA API
350	42115	KONSTRUKSI TEROWONGAN
351	42120	PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API
352	42211	KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI
353	42212	KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE
354	42213	KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL
355	42214	KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI SARANA BANTU NAVIGASI LAUT DAN RAMBU SUNGAI
356	42215	KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI NAVIGASI UDARA
357	42216	KONSTRUKSI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API
358	42217	KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI
359	42218	PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH
360	42219	KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA
361	42220	PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH
362	42911	KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR
363	42912	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN
364	42913	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN
365	42914	KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN DAN PENAMPUNGAN BARANG MINYAK DAN GAS

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
366	42915	PENGERUKAN
367	42919	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL
368	42920	PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA
369	43110	PEMBONGKARAN
370	43120	PENYIAPAN LAHAN
371	43211	INSTALASI LISTRIK
372	43212	INSTALASI TELEKOMUNIKASI
373	43213	INSTALASI NAVIGASI LAUT DAN SUNGAI
374	43214	INSTALASI NAVIGASI UDARA
375	43215	INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API
376	43216	INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA
377	43217	INSTALASI ELEKTRONIKA
378	43221	INSTALASI AIR (PIPA)
379	43222	INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL
380	43223	INSTALASI MINYAK DAN GAS
381	43224	INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA
382	43291	INSTALASI MEKANIKAL
383	43299	INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL
384	43301	PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMUNIUM
385	43302	PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON
386	43303	PENGECATAN
387	43304	DEKORASI INTERIOR
388	43305	DEKORASI EKSTERIOR
389	43309	PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA
390	43901	PEMASANGAN PONDASI DAN PILAR
391	43902	PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER)
392	43903	PEMASANGAN ATAP/ROOF COVERING
393	43904	PEMASANGAN KERANGKA BAJA
394	43905	PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR
395	43909	KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL
396	46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
397	46201	PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA
398	46202	PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK
399	46203	PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TUMBUHAN
400	46204	PERDAGANGAN BESAR TEMBAKAU RAJANGAN
401	46206	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN
402	46209	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA
403	46311	PERDAGANGAN BESAR BERAS
404	46312	PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN
405	46313	PERDAGANGAN BESAR SAYURAN
406	46314	PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO
407	46315	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI
408	46319	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA
409	46321	PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN
410	46322	PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN
411	46323	PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA
412	46324	PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
413	46325	PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR
414	46326	PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU
415	46327	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI
416	46331	PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA
417	46332	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI
418	46335	PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU
419	46339	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA
420	46411	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL
421	46412	PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN
422	46413	PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI
423	46414	PERDAGANGAN BESAR BARANG LAINNYA DARI TEKSTIL
424	46419	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA
425	46422	PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK
426	46491	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA
427	46494	PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK
428	46496	PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK
429	46497	PERDAGANGAN BESAR PERHIASAN DAN JAM
430	46498	PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK
431	46499	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL
432	46512	PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK
433	46591	PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
434	46593	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
435	46599	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
436	46610	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI
437	46620	PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM
438	46692	PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA
439	46693	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN
440	46699	PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG
441	46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR
442	47111	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET/MINIMARKET
443	47112	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET/MINIMARKET (TRADISIONAL)
444	47191	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)
445	47192	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)
446	47211	PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA
447	47212	PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN
448	47213	PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN
449	47214	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN
450	47215	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN
451	47216	PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN
452	47219	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA
453	47221	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
454	47222	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL
455	47230	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO
456	47241	PERDAGANGAN ECERAN BERAS
457	47242	PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA
458	47243	PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH
459	47244	PERDAGANGAN ECERAN TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM
460	47245	PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN
461	47249	PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA
462	47301	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR KENDARAAN DI SPBU
463	47302	PERDAGANGAN ECERAN PREMIUM, PREMIX DAN SOLAR DI TOKO
464	47411	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA
465	47412	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DAN SEJENISNYA
466	47413	PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)
467	47414	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI
468	47415	PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR
469	47511	PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL
470	47512	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL
471	47513	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHIT
472	47521	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI
473	47522	PERDAGANGAN ECERAN KACA
474	47523	PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA
475	47524	PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU
476	47525	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN
477	47526	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU
478	47527	PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK
479	47528	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN
480	47529	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA
481	47530	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO
482	47591	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR
483	47592	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA
484	47593	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK
485	47594	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT
486	47595	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN
487	47596	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN
488	47597	PERDAGANGAN ECERAN ALAT MUSIK
489	47599	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM SUBGOLONGAN 4759
490	47611	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR
491	47612	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN
492	47620	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO DI TOKO
493	47630	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO
494	47640	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
495	47650	PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON
496	47711	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN
497	47712	PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA
498	47713	PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN
499	47714	PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA
500	47721	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA
501	47722	PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI DI APOTIK
502	47723	PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI BUKAN DI APOTIK
503	47724	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL
504	47725	PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK
505	47726	PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN
506	47727	PERDAGANGAN ECERAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)
507	47729	PERDAGANGAN ECERAN LAINNYA BUKAN YANG TERCAKUP PADA KELOMPOK 47721 S.D. 47727
508	47731	PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA
509	47732	PERDAGANGAN ECERAN ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA
510	47733	PERDAGANGAN ECERAN KACA MATA
511	47734	PERDAGANGAN ECERAN JAM
512	47735	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERHIASAN
513	47736	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR
514	47737	PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK
515	47739	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL
516	47746	PERDAGANGAN ECERAN BARANG ANTIK
517	47752	PERDAGANGAN ECERAN HEWAN TERNAK
518	47753	PERDAGANGAN ECERAN IKAN HIAS
519	47754	PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN HEWAN PIARAAN
520	47761	PERDAGANGAN ECERAN BUNGA POTONG/FLORIST
521	47762	PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN HIAS, BIBIT BUAH-BUAHAN DAN TANAMAN OBAT
522	47763	PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA
523	47781	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KAYU, BAMBU, ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA
524	47782	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KULIT, TULANG, TANDUK, GADING, BULU DAN BINATANG/HEWAN YANG DIAWETKAN
525	47783	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI LOGAM
526	47784	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KERAMIK
527	47785	PERDAGANGAN ECERAN LUKISAN
528	47789	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN LAINNYA
529	47811	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI PADI DAN PALAWIJA
530	47812	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI BUAH-BUAHAN
531	47813	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI SAYUR-SAYURAN
532	47814	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PETERNAKAN
533	47815	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERIKANAN
534	47816	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN
535	47819	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI TANAMAN HIAS DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
536	47821	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BERAS
537	47822	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROTI, KUE KERING, KUE BASAH DAN SEJENISNYA
538	47823	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOPI, GULA PASIR, GULA MERAH DAN SEJENISNYA
539	47824	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM
540	47825	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR DAGING OLAHAN DAN BIOTA AIR OLAHAN
541	47826	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MINUMAN
542	47827	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROKOK DAN TEMBAKAU
543	47828	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAN TERNAK, PAKAN UNGGAS DAN PAKAN IKAN
544	47829	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI MAKANAN DAN MINUMAN YTDL
545	47831	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL
546	47832	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN
547	47833	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA
548	47834	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PELENGKAP PAKAIAN DAN BENANG
549	47841	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA
550	47842	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR FARMASI
551	47843	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR OBAT TRADISIONAL
552	47844	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOSMETIK
553	47845	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA
554	47846	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)
555	47849	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM DAN YBDI YTDL
556	47851	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KACA MATA
557	47852	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PERHIASAN
558	47853	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR JAM
559	47854	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA
560	47855	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR
561	47859	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KEPERLUAN PRIBADI LAINNYA
562	47861	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ELEKTRONIK
563	47862	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT DAN PERLENGKAPAN LISTRIK
564	47863	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK/MELAMIN
565	47864	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT
566	47865	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN
567	47866	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN
568	47867	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT KEBERSIHAN
569	47869	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA
570	47871	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, KARTON DAN BARANG DARI KERTAS
571	47872	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
572	47873	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)
573	47874	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT OLAHRAGA DAN ALAT MUSIK
574	47875	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT FOTOGRAFI, ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA
575	47876	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MESIN KANTOR
576	47877	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI
577	47879	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR CAMPURAN KERTAS, KARTON, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS-MENULIS, ALAT GAMBAR, HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN LAINNYA
578	47881	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN
579	47882	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAINAN ANAK-ANAK
580	47883	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR LUKISAN
581	47891	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HEWAN HIDUP
582	47892	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, MINYAK PELUMAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA
583	47893	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ANTIK
584	47894	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA
585	47895	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN, ALAS KAKI, PERLENGKAPAN PAKAIAN DAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS
586	47896	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS
587	47897	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS CAMPURAN
588	47899	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA
589	49111	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG
590	49112	ANGKUTAN JALAN REL KHUSUS WISATA
591	49121	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG
592	49129	ANGKUTAN JALAN REL KHUSUS LAINNYA
593	49211	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP)
594	49212	ANGKUTAN BUS PERBATASAN
595	49213	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP)
596	49214	ANGKUTAN BUS KOTA
597	49215	ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA
598	49222	ANGKUTAN BUS PARIWISATA
599	49300	ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA
600	49411	ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS
601	49412	ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS
602	49413	ANGKUTAN PERKOTAAN
603	49414	ANGKUTAN PERDESAAN
604	49421	ANGKUTAN TAKSI
605	49422	ANGKUTAN SEWA
606	49423	ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG
607	49424	ANGKUTAN OJEK MOTOR
608	49425	ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK WISATA
609	49429	ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG
610	49431	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM
611	49432	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS
612	50111	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK PENUMPANG
613	50112	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
614	50113	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK WISATA
615	50114	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG
616	50121	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK PENUMPANG
617	50122	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG
618	50123	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK WISATA
619	50131	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK BARANG
620	50132	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK BARANG
621	50133	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK BARANG
622	50134	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG
623	50141	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK BARANG
624	50142	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK BARANG
625	50211	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TETAP DAN TERATUR
626	50212	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK
627	50213	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR UNTUK
628	50214	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG
629	50215	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG
630	50216	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG
631	50217	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG
632	50218	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG
633	50219	ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN
634	50222	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS
635	50223	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA
636	50224	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG
637	50225	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG
638	50226	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG
639	50227	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG
640	50228	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG
641	50229	ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN
642	51101	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK PENUMPANG
643	51102	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG
644	51103	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL INTERNASIONAL UNTUK PENUMPANG
645	51104	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK PENUMPANG
646	51105	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG
647	51106	ANGKUTAN UDARA KHUSUS OLAHRAGA
648	51107	ANGKUTAN UDARA KHUSUS UNTUK WISATA
649	51109	ANGKUTAN UDARA KHUSUS LAINNYA
650	51201	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK BARANG
651	51202	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG
652	51203	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL INTERNASIONAL UNTUK BARANG
653	51204	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK BARANG
654	51205	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG
655	52101	PERGUDANGAN

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
656	52102	JASA COLD STORAGE
657	52103	JASA BOUNDED WAREHOUSING ATAU WILAYAH KAWASAN BERIKAT
658	52109	JASA PERGUDANGAN LAINNYA
659	52211	JASA TERMINAL DARAT
660	52213	JASA JALAN TOL
661	52219	JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA
662	52221	JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN LAUT
663	52222	JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN SUNGAI DAN DANAU
664	52223	JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN PENYEBERANGAN
665	52229	JASA PENUNJANG ANGKUTAN AIR LAINNYA
666	52230	JASA KEBANDARUDARAAN
667	52240	PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)
668	52291	JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT)
669	52292	JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD)
670	52299	JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL
671	53200	KURIR
672	55111	HOTEL BINTANG LIMA
673	55112	HOTEL BINTANG EMPAT
674	55113	HOTEL BINTANG TIGA
675	55114	HOTEL BINTANG DUA
676	55115	HOTEL BINTANG SATU
677	55120	HOTEL MELATI
678	55130	PONDOK WISATA (HOME STAY)
679	55191	PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL)
680	55192	BUMI PERKEMAHAN
681	55193	PERSINGGAHAN KARAVAN
682	55194	VILA
683	55195	APARTEMEN HOTEL
684	55199	PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA
685	55900	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA
686	56101	RESTORAN
687	56102	WARUNG MAKAN
688	56103	KEDAI MAKANAN
689	56104	PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP
690	56210	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)
691	56290	PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA
692	56301	BAR
693	56302	KELAB MALAM ATAU DISKOTIK YANG UTAMANYA MENYEDIAKAN MINUMAN
694	56303	RUMAH MINUM/KAFE
695	56304	KEDAI MINUMAN
696	56305	RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL
697	56306	PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP
698	58110	PENERBITAN BUKU
699	58120	PENERBITAN BUKU DIREKTORI DAN MAILING LIST
700	58130	PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL, BULETIN DAN MAJALAH
701	58190	PENERBITAN LAINNYA
702	58200	PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)
703	59111	PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
704	59112	PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA
705	59121	PASCA PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH
706	59122	PASCA PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA
707	59131	DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH
708	59132	DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA
709	59140	KEGIATAN PEMUTARAN FILM
710	59201	PEREKAMAN SUARA
711	59202	PENERBITAN MUSIK DAN BUKU MUSIK
712	60101	PENYIARAN RADIO OLEH PEMERINTAH
713	60102	PENYIARAN RADIO OLEH SWASTA
714	60201	PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH PEMERINTAH
715	60202	PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH SWASTA
716	61991	TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK PENYIARAN
717	62010	KEGIATAN PEMROGRAMAN KOMPUTER
718	62090	KEGIATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA
719	63111	KEGIATAN PENGOLAHAN DATA
720	63120	PORTAL WEB
721	63911	KEGIATAN KANTOR BERITA OLEH PEMERINTAH
722	63912	KEGIATAN KANTOR BERITA OLEH SWASTA
723	65121	ASURANSI NON JIWA KONVENSIONAL
724	65122	ASURANSI NON JIWA SYARIAH
725	66197	JASA PENUKARAN MATA UANG (MONEY CHANGER)
726	68110	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA
727	68120	KAWASAN PARIWISATA
728	68200	REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
729	70201	JASA KONSULTAN PARIWISATA
730	70202	JASA KONSULTAN TRANSPORTASI
731	70209	KEGIATAN KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA
732	71100	JASA ARSITEKUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI
733	71202	JASA PENGUJIAN LABORATORIUM
734	71203	JASA INSPEKSI
735	71204	JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI
736	71205	JASA KALIBRASI/METROLOGI
737	71209	JASA ANALISIS DAN UJI TEKNIS LAINNYA
738	72102	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA
739	72201	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
740	72202	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUMANIORA
741	73100	PERIKLANAN
742	73200	PENELITIAN PASAR DAN JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT
743	74100	JASA PERANCANGAN KHUSUS
744	74201	JASA FOTOGRAFI
745	74902	JASA KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS
746	77100	JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA
747	77210	JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT REKREASI DAN OLAHRAGA
748	77295	JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT MUSIK
749	77301	JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
750	77302	JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
751	77303	JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI AIR
752	77304	JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI UDARA
753	77306	JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL
754	79111	JASA AGEN PERJALANAN WISATA
755	79112	JASA AGEN PERJALANAN BUKAN WISATA
756	79120	JASA BIRO PERJALANAN WISATA
757	79910	JASA INFORMASI PARIWISATA
758	79920	JASA PRAMUWISATA
759	79990	JASA RESERVASI LAINNYA YBDI YTDL
760	82301	JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN
761	82302	JASA EVENT ORGANIZER
762	82920	JASA PENGEPAKAN
763	85111	JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH PEMERINTAH
764	85112	JASA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH PEMERINTAH
765	85121	JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
766	85122	JASA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
767	85210	JASA PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH PEMERINTAH
768	85220	JASA PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA
769	85230	JASA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN PEMERINTAH
770	85240	JASA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SWASTA
771	85311	JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR PEMERINTAH
772	85312	JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON GELAR PEMERINTAH
773	85321	JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR SWASTA
774	85322	JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON GELAR SWASTA
775	85410	JASA PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN REKREASI
776	85420	JASA PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
777	85430	JASA PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH
778	85491	JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN
779	85492	JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA
780	85493	JASA PENDIDIKAN BAHASA SWASTA
781	85494	JASA PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA
782	85495	JASA PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA
783	85496	JASA PENDIDIKAN AWAK PESAWAT DAN JASA ANGKUTAN UDARA KHUSUS PENDIDIKAN AWAK PESAWAT
784	85497	JASA PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA
785	85498	JASA PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI
786	85499	JASA PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
787	85500	JASA PENUNJANG PENDIDIKAN
788	85601	JASA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH
789	85602	JASA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
790	85603	JASA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN SWASTA
791	85604	JASA PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
792	86101	JASA RUMAH SAKIT PEMERINTAH
793	86102	JASA PUSKESMAS
794	86103	JASA RUMAH SAKIT SWASTA
795	86104	JASA POLIKLINIK SWASTA
796	86109	JASA RUMAH SAKIT LAINNYA
797	90001	KEGIATAN SENI PERTUNJUKAN
798	90002	KEGIATAN PEKERJA SENI
799	90003	JASA PENUNJANG HIBURAN
800	90004	JASA IMPRESARIAT BIDANG SENI
801	90005	JURNALIS BERITA INDEPENDEN
802	90009	KEGIATAN HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA
803	91021	MUSEUM YANG DIKELOLA PEMERINTAH
804	91022	MUSEUM YANG DIKELOLA SWASTA
805	91023	PENINGGALAN SEJARAH YANG DIKELOLA PEMERINTAH
806	91024	PENINGGALAN SEJARAH YANG DIKELOLA SWASTA
807	91025	TAMAN BUDAYA
808	91029	WISATA BUDAYA LAINNYA
809	91031	KEGIATAN TAMAN KONSERVASI ALAM
810	91032	TAMAN NASIONAL (TN)
811	91033	TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA)
812	91034	TAMAN WISATA ALAM (TWA)
813	91035	HUTAN LINDUNG (HL), SUAKA MARGASATWA (SM), DAN CAGAR ALAM (CA)
814	91036	TAMAN LAUT
815	91037	TAMAN BURU DAN KEBUN BURU
816	91039	KEGIATAN TAMAN KONSERVASI ALAM LAINNYA
817	93112	LAPANGAN GOLF
818	93113	GELANGGANG BOWLING
819	93114	GELANGGANG RENANG
820	93115	LAPANGAN SEPAK BOLA
821	93116	LAPANGAN TENIS LAPANGAN
822	93117	KEGIATAN PUSAT KEBUGARAN/FITNESS CENTER
823	93118	SPORT CENTRE
824	93119	KEGIATAN FASILITAS OLAHRAGA LAINNYA
825	93191	PROMOTOR KEGIATAN OLAHRAGA
826	93193	KEGIATAN PERBURUAN
827	93199	KEGIATAN LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN OLAHRAGA
828	93210	KEGIATAN TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN
829	93221	PEMANDIAN ALAM
830	93222	WISATA GUA
831	93223	WISATA PETUALANGAN ALAM
832	93229	DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA
833	93231	WISATA AGRO
834	93232	TAMAN REKREASI/TAMAN WISATA
835	93233	KOLAM PEMANCINGAN
836	93239	DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA
837	93241	ARUNG JERAM
838	93242	WISATA SELAM
839	93243	DERMAGA MARINA

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
840	93249	WISATA TIRTA LAINNYA
841	93292	KARAOKE KELUARGA
842	93293	USAHA ARENA PERMAINAN
843	93299	KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL
844	96122	SPA (SANTE PAR AQUA)
845	96129	JASA KEBUGARAN LAINNYA
846	49221	ANGKUTAN BUS KHUSUS

O. CONTOH PENGHITUNGAN PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

1. Contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dengan dasar penghitungan SPT Tahunan

Besarnya angsuran pajak yang masih harus dibayar sendiri oleh PT A setiap bulan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp50.000.000,00. PT A menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2019 pada 27 April 2020:

a. PT A menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 pada tanggal 28 April 2020.

Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk suatu bulan adalah sebagai berikut:

PPh Terutang SPT Tahunan 2019	Rp1.125.000.000,00
Dikurangi Kredit Pajak	Rp645.000.000,00
PPh yang masih harus dibayar (PPh Pasal 29)	Rp480.000.000,00
Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan Tahun Pajak 2020	Rp40.000.000,00

Rincian Angsuran PPh Pasal 25	
Masa Pajak Januari 2020 s.d. Maret 2020 (menggunakan angsuran Masa Pajak Desember 2019)	Rp50.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2020 s.d. September 2020 (yang seharusnya terutang)	Rp40.000.000,00
Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2020 s.d. September 2020 (40.000.000 x 30%)	Rp12.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2020 s.d. September 2020	Rp28.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Oktober 2020 s.d. Desember 2020 (sesuai SPT Tahunan 2019)	Rp40.000.000,00

b. PT A menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuranPPh Pasal 25 pada tanggal 28 Juli 2020.

Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk suatu bulan adalah sebagai berikut:

PPh Terutang SPT Tahunan 2019	Rp1.125.000.000,00
Dikurangi Kredit Pajak	Rp645.000.000,00
Selisih	Rp480.000.000,00
Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan Tahun Pajak 2020	Rp40.000.000,00

Rincian Angsuran PPh Pasal 25	
Masa Pajak Januari 2020 s.d. Maret 2020 (menggunakan angsuran Masa Pajak Desember 2019)	Rp50.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Mei 2020 s.d. Masa Pajak Juni 2020 (yang seharusnya terutang)	Rp40.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2020 s.d. Masa Pajak September 2020 (yang sesharusnya terutang)	Rp40.000.000,00
Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2020 s.d. Masa Pajak September 2020 (40.000.000 x 30%)	Rp12.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2020 s.d. Masa Pajak September 2020	Rp28.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Oktober 2020 s.d. Masa Pajak Desember 2020 (sesuai SPT Tahunan 2019)	Rp40.000.000,00

2. Contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban laporan berkala (Wajib Pajak masuk bursa)

Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2020 sampai dengan Masa Pajak Maret 2020 sebesar Rp150.000.000,00. Informasi akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan tahun 2020 sebagai berikut:

Laporan Triwulan	Januari – Maret	April – Juni
Penghasilan Neto	Rp2.100.000.000,00	Rp4.700.000.000,00
PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23	Rp75.000.000,00	Rp125.000.000,00

a. PT B menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 pada tanggal 9 April 2020.

Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk 3 (tiga) Masa Pajak selanjutnya adalah sebagai berikut:

Masa Pajak	April – Juni	Juli – September
Periode yang dilaporkan	Triwulan I	Triwulan II
Penghasilan Neto	Rp2.100.000.000,00	Rp4.700.000.000,00
PPh Terutang	Rp525.000.000,00	Rp1.175.000.000,00
Dikurangi: - PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan	Rp75.000.000,00	Rp125.000.000,00
- Angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak periode yang dilaporkan	Rp150.000.000,00	Rp450.000.000,00
Angsuran yang masih harus dibayar (dalam 3 bulan)	Rp300.000.000,00	Rp600.000.000,00
Angsuran yang seharusnya dibayar per bulan	Rp100.000.000,00	Rp200.000.000,00
Pengurang angsuran PPh Pasal 25	Rp30.000.000,00 (Rp100.000.000,00x30%)	Rp60.000.000,00 (Rp100.000.000,00x30%)
Angsuran setelah pengurangan PPh Pasal 25	Rp70.000.000,00	Rp140.000.000,00

b. PT B menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 pada 29 Juli 2020.

Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk 3 (tiga) Masa Pajak selanjutnya adalah sebagai berikut:

Masa Pajak	April – Juni	Juli – September
Periode yang dilaporkan	Triwulan I	Triwulan II
Penghasilan Neto	Rp2.100.000.000,00	Rp4.700.000.000,00
PPh Terutang	Rp525.000.000,00	Rp1.175.000.000,00
Dikurangi: - PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan	Rp75.000.000,00	Rp125.000.000,00
- Angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak periode yang dilaporkan	Rp150.000.000,00	Rp450.000.000,00
Angsuran yang masih harus dibayar (dalam 3 bulan)	Rp300.000.000,00	Rp600.000.000,00
Angsuran yang seharusnya dibayar per bulan	Rp100.000.000,00	Rp200.000.000,00
Pengurang angsuran PPh Pasal 25	-	Rp60.000.000,00 (Rp100.000.000,00x30%)
Angsuran setelah fasilitas	Rp100.000.000,00	Rp140.000.000,00

P. FORMULIR REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

LAPORAN REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Wajib Pajak : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Masa Pajak : ..... (3)

Rincian pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25:

No. (4)	April/Juli*)		Mei/ Agustus*)		Juni/September*)	
	PPh Terutang	Pengurang Angsuran	PPh Terutang	Pengurang Angsuran	PPh Terutang	Pengurang Angsuran

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., ... 2020 (5)

(6)

..... (7)
NPWP: ..... (8)

*) : dicoret salah satu sesuai Masa Pajak

Petunjuk Pengisian Formulir Laporan Realisasi Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25:

(1) Diisi dengan Wajib Pajak yang mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.
(2) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.
(3) Diisi dengan periode pelaporan.
(4) Diisi dengan nomor urut.
(5) Diisi dengan tanggal laporan.
(6) Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak yang membuat laporan.
(7) Diisi dengan nama terang Wajib Pajak yang membuat laporan.
(8) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang membuat laporan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

TITIN KRISNIATI
NIP 19730115 199803 2 002